



2025

LAPORAN KINERJA

**Sekretariat Daerah
Kabupaten Mojokerto**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2025 yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kendala pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat menjadi panduan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang diemban menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*).

Mojokerto, Februari 2026



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 8 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja dan 8 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dan dengan 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi perjanjian kinerja tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	2,15	1,19	55,35%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	89,90	93,27	104%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,38	101%
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%	100%	100%
6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	3,15 (sedang)	3,29 (asumsi nilai tahun 2023)	105%
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,15	67,69	82%
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	80,34	87,40	108,79%
Rata - rata capaian					94,47%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	86,11	86,19	100,09%
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,10%	93,04	98,87%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	86,50 (Tinggi)	86,33 (tinggi)	99,80%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	14 Inovasi	14 Inovasi	100%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai RB General	76,25	75,46	98,96%
	Nilai SAKIP PD	86,11	86,19	100,09%
<i>Rata - rata capaian</i>				99,52%

Kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 103.131.075.100,00 atau 93,04% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 110.842.549.824,00.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Gambaran Umum.....	3
I.3. Isu-isu Strategis.....	5
I.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
II.1 Penjenjangan Strategis	12
II.2. Indikator Kinerja Utama.....	30
II.3. Perjanjian Kinerja	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
III.1. Pengukuran Kinerja.....	39
III.2. Analisis Kinerja.....	41
III.3. Prestasi Kinerja	54
III.4 Akuntabilitas Anggaran	56
BAB IV	58
PENUTUP	58
IV.1. KESIMPULAN	58
IV.2. LANGKAH PERBAIKAN	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.A Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	18
Tabel II.1.B Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	23
Tabel II.2.A Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	31
Tabel II.2.B Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	34
Tabel II.3.A Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	36
Tabel II.3.B Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	37
Tabel II.4 Anggaran Per Program	38
Tabel III.1.A Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	39
Tabel III.1.B Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	40
Tabel III.2.A Perbandingan Realisasi Kinerja (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	45
Tabel III.2.B Perbandingan Realisasi Kinerja (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	51
Tabel III.3 Perbandingan nilai SAKIP Sekretariat Daerah, Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	55
Tabel III.4.A Perbandingan Realisasi Kinerja dengan (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	55
Tabel III.4.B Perbandingan Realisasi Kinerja dengan (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	56
Tabel III.5 Realisasi Anggaran Tahun 2025	56
Tabel III.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto	
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP	54

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum, untuk mewujudkan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hal yang sangat penting diperhatikan untuk mencapai tujuan Negara. Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja instansi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah dokumen resmi tahunan yang memuat pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, berisi ringkasan pencapaian sasaran strategis, hasil program/kegiatan, serta analisis keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas publik sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyampaian LKJIP Sekretariat Daerah tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029, khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2025. Disamping itu penyusunan LKJIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

LKJIP disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan dan penganggaran kinerja. Oleh karena itu, LKJIP memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja (PK). Sasaran, indikator kinerja, dan target yang dilaporkan dalam LKJIP merupakan turunan langsung dari dokumen-dokumen perencanaan tersebut.

Renstra menjadi landasan strategis dalam penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah instansi, yang selanjutnya dijabarkan secara tahunan melalui Renja. Renja memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yang kemudian dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai komitmen kinerja antara pimpinan instansi dengan atasan langsung. Capaian kinerja yang disajikan dalam LKJIP merupakan hasil pengukuran atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut

Selain sebagai laporan pertanggungjawaban, LKJIP memiliki peran strategis sebagai bahan evaluasi dan masukan utama dalam proses perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Informasi kinerja yang disajikan dalam LKJIP baik yang

menunjukkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program kegiatan menjadi dasar dalam menilai efektivitas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.

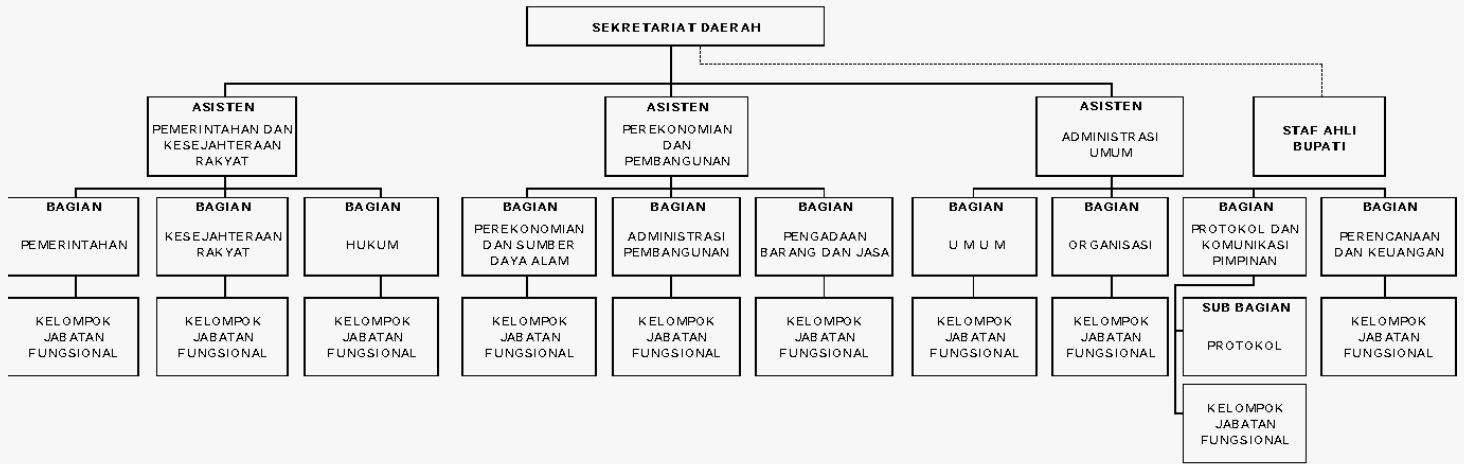
Melalui pemanfaatan LKJIP secara optimal diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan kinerja secara berkelanjutan, memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta mendorong terwujudnya kinerja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pada periode perencanaan selanjutnya.

I.2. Gambaran Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto berlokasi di jalan Ahmad Yani No 16, Mergelo, Purwotengah, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi kantor berada di pusat pemerintahan daerah sehingga mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari aparatur sipil negara dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang beragam, mencakup pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana. SDM yang ada diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara efektif dan profesional. Selain itu peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Aset yang dimiliki Sekretariat Daerah meliputi gedung, kendaraan operasional, kendaraan dinas jabatan, peralatan kerja, dan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menunjang kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, disebutkan bahwa tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Gambar I.1. Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto menjalankan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1) Bagian Pemerintahan membawahi kelompok jabatan fungsional .
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 3) Bagian Hukum membawahi kelompok jabatan fungsional
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

- 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi kelompok jabatan fungsional
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
- 1) Bagian Umum membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 2) Bagian Organisasi membawahi kelompok jabatan fungsional
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi kelompok jabatan fungsional

I.3. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu – isu strategis di Sekretariat Daerah dapat diuraikan sesuai tugas dan fungsi masing – masing Bagian sebagai berikut :

1. Bagian Organisasi :
 - a. Tantangan adaptasi terhadap transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dalam penataan organisasi, tata laksana, dan pelayanan publik belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menghambat percepatan terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien
 - b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang

cepat, transparan, dan akuntabel menuntut Bagian Organisasi untuk terus mendorong perbaikan standar pelayanan, SOP, serta sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2. Bagian Umum:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menghadapi adaptasi terhadap transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik, sehingga menghambat percepatan terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien
- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel menuntut Bagian Umum untuk terus mendorong perbaikan standar pelayanan, SOP, serta sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan:

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi keuangan Perangkat Daerah
- b. Memaksimalkan pelaporan indeks kepuasan masyarakat Bagian Perencanaan dan Keuangan

4. Bagian Pemerintahan :

- a. Jumlah laporan PD yang sudah selesai dengan baik belum tercapai, dengan permasalahan ketidaktepatan PD dalam memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan dan faktor – faktor penentu keberhasilan adalah koordinasi yang intensif antar PD untuk melengkapi IKK dan LPPD
- b. Jumlah kecamatan yang dibina belum tercapai dengan permasalahan hanya sebagian kecamatan yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan kepada Camat, faktor – faktor penentu keberhasilan adalah keterbatasan anggaran dan personil untuk mengalokasikan kegiatan PATEN di setiap kecamatan
- c. Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 (satu) tahun, belum tercapai dengan permasalahan masih banyak desa yang belum ditegaskan batas desanya

5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

- a. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui program perekonomian dan pembangunan di daerah serta pemberdayaan wirausaha informal serta usaha kecil dan menengah

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa :
 - a. Perencanaan dan implementasi serta konsolidasi pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya memadai
 - b. Pelaku pengadaan belum sepenuhnya memanfaatkan SPSE
 - c. Pembentukan UKPBJ belum sepenuhnya memadai.
7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Tingginya dinamika agenda pimpinan yang menuntut kesiapan layanan keprotokolan secara cepat dan tepat
 - b. Belum optimalnya integrasi informasi agenda pimpinan lintas perangkat daerah
 - c. Tuntutan kecepatan penyediaan konten informasi pimpinan
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a. Adanya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan job description
 - b. Masih banyaknya ASN yang kurang paham teknologi informasi
 - c. Adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur di Bagian Kesra
9. Bagian Hukum
 - a. Keterbatasan kapasitas SDM di bidang perancangan dan pengelolaan informasi hukum
 - b. Belum optimalnya koordinasi lintas PD/UKPD dalam penyusunan produk hukum daerah
 - c. Belum optimalnya mekanisme evaluasi efektivitas produk hukum daerah
10. Bagian Administrasi Pembangunan
 - a. Keterbatasan kapasitas SDM dalam pelaksanaan monitoring pelaporan kegiatan fisik konstruksi

Adapun faktor faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan isu-isu strategis satu tahun mendatang adalah sebagai berikut:

A. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam organisasi, sehingga perlu menjadi perhatian agar dapat menjadi kekuatan dalam melaksanakan tujuan organisasi sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah. Faktor internal ini meliputi dua unsur, yaitu sebagai unsur kekuatan dan unsur kelemahan dalam Organisasi Perangkat Daerah . Dari dua unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur kekuatan dalam Perangkat Daerah
 1. Adanya pembagian tugas dan atau pelimpahan kewenangan / kegiatan (sub. kegiatan) dari Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tugas dan fungsi;
 2. Dengan penambahan arsip produk hukum setiap tahun perlu peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen penyimpanan naskah produk hukum dengan mewujudkan perpustakaan produk hukum
 3. Sebagai unsur staf yang langsung di bawah Bupati mempermudah proses koordinasi baik dengan PD maupun dengan pihak ekstern dalam melaksanakan tugas pimpinan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
 4. Dengan mendayagunakan dukungan dari pimpinan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan memanfaatkan adanya pengawasan dari publik akan dapat mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah yang lebih maju
 5. Dengan mendayagunakan sumber dana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dan memanfaatkan banyaknya kegiatan yang perlu pelayanan cepat maka akan dapat diwujudkan pelayanan yang tepat waktu. Adanya penambahan SDM dalam struktur organisasi perangkat daerah menjadikan pelayanan dapat lebih cermat dengan hasil maksimal sesuai kebutuhan tugas dan fungsi serta adanya upaya terhadap perbaikan kesejahteraan pegawai serta penyetaraan Gender.
 6. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah.
2. Unsur kelemahan dalam Perangkat Daerah
 1. Menurunnya motivasi / kejenuhan karena rutinitas yang sama dan adanya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan job description
 2. Penambahan jumlah SDM dalam organisasi perangkat daerah belum diimbangi dengan penambahan sarana kerja dan Kemampuan SDM di bidang protokol, fotografi dan jurnalistik perlu adanya peningkatan guna mengikuti perkembangan teknologi informasi
 3. Dengan berpedoman pembinaan kehidupan beragama yang merupakan nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai pedoman dari sumber kearifan tatanan kehidupan

4. Masih terbatasnya tenaga teknis bangunan untuk memverifikasi usulan bantuan keuangan, menyebabkan adanya kendala dalam memberikan rekomendasi pada usulan pembangunan yang ada di SIPD
5. Untuk menciptakan good governance dan clean government dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum melalui perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan untuk mempublikasikan produk hukum, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat melalui media elektronik
6. Adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur serta anggaran peningkatan kualitas SDM di lingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Mojokerto dan perubahan status kepegawaian pada jabatan struktural ke jabatan fungsional

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi itu sendiri, agar sebuah organisasi dapat memanfaatkan faktor eksternal serta juga dapat mempertahankan diri dari kekuatan luar yang bisa menghambat kemajuan sebuah organisasi. Faktor eksternal ini meliputi dua unsur, yaitu sebagai unsur peluang dan unsur ancaman atau tantangan dalam organisasi. Dari dua unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur Peluang dalam Perangkat Daerah
 1. Adanya persyaratan sertifikasi uji kompetensi untuk tugas tertentu dan pemanfaatan teknologi informasi
 2. Semakin mantapnya stabilitas politik dan keamanan kehidupan masyarakat yang religius dan mendukung agenda reformasi dan demokratisasi
 3. Adanya koordinasi dengan OPD penyelenggara kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik
 4. Masih kurangnya komitmen dalam prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan fasilitas kegiatan sosial
 5. Untuk menciptakan good governance dan clean government dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum. Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan reformasi birokrasi

6. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem pengadaan barang jasa pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
 7. Pelaksanaan penatausahaan keuangan pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) belum berjalan maksimal dan masih perlu adanya penyesuaian dengan Sistem Keuangan Daerah, dan terbitnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD-RI) sehingga sangat perlu peningkatan koordinasi dan kemampuan pengelolaan keuangan dalam penerapan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dalam realisasi anggaran
2. Unsur Ancaman dalam Perangkat Daerah
1. Sering terjadinya perubahan kebijakan peraturan baik dari pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan tugas overlapping dari pemerintah pusat dan sering terjadi perubahan personel
 2. Untuk menciptakan good governance dan clean government dibutuhkan berbagai upaya pembinaan hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dengan menetapkan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum
 3. Kurang adanya koordinasi OPD penyelenggara, sehingga penyelenggara acara berjalan kurang maksimal
 4. Semakin tingginya tuntutan masyarakat kepada kepuasan pelayanan publik perlu dilakukan terobosan/terobosan/inovasi yang harus tetap memperhatikan norma-norma hukum dan perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan untuk mempublikasikan produk hukum, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat melalui media elektronik
 5. Pemanfaatan hasil analisis beban kerja belum maksimal dan banyaknya acuan pelaksanaan tugas yang overlapping dari pemerintah pusat dan belum maksimalnya penerapan sistem pengawasan internal
 6. Masih adanya upaya intervensi dari berbagai pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021-2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Sekretariat Daerah dengan tugas utama membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative mendukung pencapaian 3 misi yaitu :

1. **Misi 1** : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
Didukung oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. **Misi 2** : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan
Didukung oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3. **Misi 3** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan
Didukung oleh Bagian Organisasi, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strateginya:

Tabel II.1.A Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kerukunan umat beragama tinggi				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75.48
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat			Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang di laksanakan	100%
	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat			Persentase layanan fasilitasi keprotokolan and komunikasi pimpinan	100%
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	8 dokumen
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 dokumen
Meningkatnya Pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi				Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD	1%
	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD			Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	1.5%
	Program Perekonomian dan Pembangunan			Persentase Peningkatan Laba BUMD	15,66
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			Tingkat Kesehatan BUMD	3,66

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 dokumen
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	1 kebijakan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 dokumen
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 dokumen
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kabupaten Mojokerto				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	79,05
	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel			Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori minimal Baik	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal Baik	100%
	Penataan Organisasi			Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal Baik	48 PD/UKPD
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	86,11 (A)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Ketentuan	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PD/UKPD dengan Tingkat Kematangan Kelembagaan Minimal Tinggi	100%
			Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan Tingkat Kematangan Kelembagaan Minimal Tinggi	48 PD/UKPD
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	4,35
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	93,85
			Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik	57 PD/UKPD
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	89,90
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan	97,25

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1960 orang/bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	63 dokumen
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	108 dokumen
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 paket
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 orang / bulan
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 paket
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	360 orang / bulan
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Umum	90,26
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	150 orang
		Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	2 paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.	12 paket

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	100%
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	7 unit
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	32 unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	250 unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	2 unit
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100%
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kerumah tangaan Sekretaris Daerah	100%
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 paket
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 paket
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12 paket
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Bagian protokol dan komunikasi pimpinan	91,88
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah yang Terasilitasi	100%
			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 laporan
			Fasiliasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	650 laporan
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	252 laporan
		Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel		Nilai LPPD	3,15 (sedang)
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pemenuhan Dokumen Pendukung Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100%
			Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah PD yang terfasilitasi dan termonitoring laporan kinerjanya sesuai ketentuan	28 PD
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26 dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 dokumen
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase peningkatan implementasi kerja sama dalam negeri yang efektif dan saling menguntungkan di semua bidang kerjasama	100%
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase peningkatan implementasi kerja sama dalam negeri yang efektif dan saling menguntungkan di semua bidang kerjasama	100%
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60 dokumen
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,15
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	77,65
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang ditindaklanjuti	100%
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	745 dokumen
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 kasus
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	785 dokumen
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan	100%
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Tingkat Pengendalian Pelaksanan Pembangunan di Lingkungan Kab. Mojokerto	100%
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 laporan
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan
Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi seluruh aktifitas				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80,34
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Maturitas UKPBJ	Level 3
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pengadaan Barang/Jasaselesai tepat waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan	100%
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	70 dokumen
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 dokumen
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 orang

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam

beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk lima tahun ke depan, kata "**Lebih**" memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat dan usaha untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan

periode sebelumnya. Sebagai bagian dari pemerintahan yang berkelanjutan, ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan program-program yang telah berjalan tetapi juga mengusung SEMANGAT PERUBAHAN guna meningkatkan kualitas pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Semangat perubahan ini diimplementasikan melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.

2. Makna "**Lebih Maju**" dimaksudkan pencapaian kondisi sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang lebih baik sehingga mampu berdaya saing sampai pada tingkatan global. Dari perspektif ekonomi makro, pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, didukung oleh peningkatan investasi, optimalisasi sektor unggulan daerah, serta penguatan ekosistem industri dan perdagangan.
3. Makna "**Lebih Adil**" dalam visi pembangunan ini adalah pemerataan peran yang berorientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan serta pemerataan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Orientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang menegaskan bahwa tidak boleh ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan dalam pembangunan.
4. Makna "**Lebih Makmur**" dalam visi pembangunan Kabupaten Mojokerto mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih baik dan merata. Kemakmuran yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana publik

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarak" sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketenteraman Masyarakat

3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*).

Berikut ini adalah matrik penjejangan strategis Sekretariat Daerah berdasarkan RPJMD tahun 2025 – 2029 :

Tabel II.1.B Matriks Penjejangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	86,36
Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai RB General	76,25
	Nilai SAKIP Setda	86,11
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	2,6
Administrasi Tata Pemerintahan	Kategori EKPP	sedang
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah data pendukung Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah data pendukung Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26 dokumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 dokumen
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kategori EKPP	sedang
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kategori EKPP	sedang
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	82,12
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	77,65
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	745 dokumen
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 kasus
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	785 produk hukum
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 dokumen
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 dokumen
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Aspek Pelaporan Kinerja (SAKIP)	12,55
		Penataan Organisasi		Nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah	83,11
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6 dokumen
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP PD	86,11
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 dokumen
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kematangan Organisasi	49,5
		Penataan Organisasi		Nilai Efektivitas Kelembagaan	95,9
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	93,85
		Penataan Organisasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	90,5
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 laporan
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan dan Keuangan	97,25
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1960 orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63 dokumen
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan dan Keuangan	97,25
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan dan Keuangan	97,25
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	108 dokumen
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan dan Keuangan	97,25
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Perencanaan dan Keuangan	97,25
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 orang
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 paket

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	360 orang
			Administrasi Umum Perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum	90,26
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum	90,26
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 kendaraan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 kendaraan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	250
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum	90,26

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum	90,26
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	91,88
			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	700
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	300
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kualitas Kebijakan	82,12
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	100
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 laporan
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai kinerja TPID	80,79
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tingkat Kesehatan BUMD	3,66

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 laporan
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tingkat Kesehatan BUMD	3,66
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 dokumen
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 dokumen
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	80,34
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 3
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 dokumen
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 dokumen
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350 orang

II.2. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub sebelumnya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut :

Tabel II.2.A Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan	(jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan / target kebijakan kesejahteraan rakyat) x 100 %	Laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Meningkatnya rasio laba BUMD terhadap PAD	Rasio laba BUMD terhadap PAD	Rasio laba BUMD terhadap PAD	Laporan hasil evaluas	Bagian Perekonomian dan SDA
3	Terwujudnya pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi piminan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan	Rata-rata hasil Sukma-E Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi PimPinan Kriteria penilaian : kategori tidak baik = 25,00 - 64,99 kategori kurang baik = 65,00 - 76'60 kategori bark = 76,61 - 88,30 kategori sangat baik = 88,31- 10	Laporan hasil Sukma-E	Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi PEKPP Kementerian PAN RB kriteria penilaian : 4,51-5,00 : A (pelayanan prima) 4,01-4,50 : A- (sangat baik) 3,51-4,00 : B (baik)	Laporan Hasil Evaluasi PEKPPP dari Kementerian PAN RB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			3,01-3,50 : B- (baik dengan catatan) 2,51-3,00: C (cukup) 2,01-2,50: C- (cukup dengan catatan) 1,51-2,00 : D (prioritas pembinaan) 1,01- 1,50 : E (prioritas pembinaan) 0-1,00 : F (prioritas pembinaan)		
5	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran serta akuntabel dengan kategori minimal baik	(Persentase PD/UKPD dengan kematangan kelembagaan minimal tinggi + Persentase PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik) /2	Laporan Hasil Evaluasi Internal	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6	Tersusunnya Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel	Nilai LPPD	LHE EPPD oleh Kemendagri klasifikasi kinerja : 1.00 - 1.80 : sangat rendah 1.81-2.60:rendah 2,61 -3.40:sedang 3.47 - 4.20: tinggi 4.21 - 5.00: sangat tinggi	LHE EPPD dari Kemedagri	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
7	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Indikator hasil Pengukuran IKK : Kategori Unggul : Nilai 91,00 - 100 Kategori Sangat Baik : Nilai 80,00 – 90,99 Kategori Baik : Nilai 65,00 - 79,99 Kategori Cukup : Nilai 50,00 – 64,99 Kategori Kurang : Nilai < 50'0	Laporan Hasil Indeks Kualitas Kebijakan dari LAN	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Penilaian ITKP oleh LKPP Predikat penilaian : Istimewa : 100 S Sangat Baik: > 90 s/d <100 Baik : >70 s/d 90 Cukup: ≥50 s/d 70 Kurang : <50	Rekap ITKP dari LKPP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Tabel II.2.B Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kinerja birokrasi	Nilai RB General	<p>Nilai RB General- Sasaran RB General:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, dan 2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional <p>- RB General: Berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal IP guna menyelesaikan permasalahan tata Kelola birokrasi (“Isu Hulu”)</p> <p>- Penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Sasaran Strategis, Bobot nilai 50 2. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB, Bobot nilai 40 3. Capaian Strategi Pelaksanaan RB General, Bobot nilai 10 <p>- Kriteria :</p> <p>Predikat Istimewa (AA) = > 90 – 100 Predikat Sangat Baik (A) = > 80 – 90 Predikat Baik (BB) = > 70 – 80 Predikat Cukup (B) = > 60 – 70 Predikat Cukup (CC) = > 50 – 60 Predikat Perlu Perbaikan (C) = > 30 – 50 Predikat Perlu Perbaikan(D) = 0 – 30</p>	LHE Reformasi Birokrasi dari MenpanRB	Menpan RB

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kriteria penilaian : Kategori Sangat Kurang : 0-30 Kategori Kurang : 30-50 Kategori Cukup : 50-60 Kategori Baik : 60-70 Kategori Sangat Baik : 70-80 Kategori Memuaskan : 80-90 Kategori Sangat Memuaskan : 90-100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat

II.3. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3.A Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	2,15	1,19	55,35%
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	89,90	93,27	104%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,38	101%
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik			
6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	3,14 (sedang)	3,29 (asumsi nilai tahun 2023)	105%
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,15	67,69	82%
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	80,34	87,40	108,79%
Rata rata capaian kinerja					94.47%

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	86,11	86,19	100.09%
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	94,10%	93,04%	98,87%
		Indeks Profesionalitas ASN	86,50 (tinggi)	86,33 (tinggi)	99.80%
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terintemalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	14 Inovasi	14 inovasi	100%

Tabel II.3.B Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai RB General	76,25	75,46	98,96%
	Nilai SAKIP PD	86,11	86,19	100,09%
Rata - rata capaian				99,52%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.4 Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp 52.100.656.382
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 56.786.671.930
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp 1.955.221.515

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Tabel III.1.A Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	2,15	1,19	55,35%
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	89,90	93,27	104%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,38	101%
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%	100%	100%
6	Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang	Nilai LPPD	3,14 (Sedang)	3,29 (sumbu nilai tahun lalu)	105%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Akuntabel				
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,15	67,69	82%
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	80,34	87,40	108,79%
Rata rata capaian kinerja					94,47%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	86,11	86,19	100.09%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,10%	93,04	98,87%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	86,50 (Tinggi)	86,33	99.80%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		14 Inovasi	14 Inovasi	100%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;

Tabel III.1.B Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai RB General	76,25				76,24	75,46	98,96%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
		Nilai SAKIP PD	86,11				86,19	100,09%	

III.2. Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dokumen perencanaan 2021 – 2025 memiliki 8 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja dan 2 kinerja lainnya dengan 4 indikator kinerja. Perhitungan capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Formulasi perhitungan pada sasaran meningkatnya kualitas kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja Persentase Kebijakan Kesejahteraan rakyat yang ditetapkan adalah :

(Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan / target kebijakan Kesejahteraan rakyat) x 100 % berdasarkan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat

2. Formulasi perhitungan pada sasaran Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD dengan indikator Rasio Laba BUMD terhadap PAD adalah :

Perhitungan rasio Laba BUMD terhadap PAD berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dengan penganggung jawab Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

3. Formulasi perhitungan pada sasaran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah :

Rata-rata Hasil Sukma-E Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, kriteria penilaian :

kategori tidak baik = 25,00 - 64,99

kategori kurang baik = 65,00 - 76,60,

kategori baik = 76,61-88,30,

kategori sangat baik = 88,31 – 100

4. Formulasi perhitungan pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik adalah :

Laporan Hasil Evaluasi PEKPPP dari Kementerian PAN RB kriteria penilaian :

4,51 – 5,00 : A (Pelayanan Prima);

4,01 – 4,50 : A- (Sangat Baik);

- 3,51 – 4,00 : B (Baik);
- 3,01 – 3,50 : (Baik dengan catatan);
- 2,51 – 3,00 : C (Cukup);
- 2,01 – 2,50 : C (Cukup dengan catatan);
- 1,51 – 2,00 : D (Proritas pembinaan);
- 1,01 – 1,50 : E (proritas pembinaan);
- 0 – 1,00 : F (Prioritas pembinaan)

5. Formulasi perhitungan pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran serta akuntabel dengan kategori minimal baik adalah :

(Persentase PD / UKPD dengan tingkat kematangan minimal tinggi + persentase PD / UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik) / 2

6. Formulasi perhitungan pada sasaran tersusunnya Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akuntabel dengan indikator Nilai LPPD adalah :

LHE EPPD oleh Kemendagri klasifikasi kinerja :

1.00 - 1.80 : sangat rendah

1.81-2.60:rendah

2,61 -3.40:sedang

3.47 - 4.20: tinggi

4.21 - 5.00: sangat tinggi

7. Formulasi perhitungan pada sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintah Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah :

Laporan Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Indikator hasil Pengukuran IKK :

Kategori Unggul : Nilai 91,00 - 100

Kategori Sangat Baik : Nilai 80,00 – 90,99

Kategori Baik : Nilai 65,00 - 79,99

Kategori Cukup : Nilai 50,00 – 64,99

Kategori Kurang : Nilai < 50'0

8. Formulasi perhitungan pada sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah :

Hasil Penilaian ITKP oleh LKPP Predikat penilaian :

Istimewa : 100 S

Sangat Baik: > 90 s/d <100

Baik : >70 s/d 90

Cukup: ≥50 s/d 70

Kurang : <50

Sedangkan formulasi perhitungan untuk sasaran pada kinerja tambahan :

1. Meningkatnya tata kelola birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator :

1. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah :

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kriteria penilaian :

Kategori Sangat kurang : 0-30

Kategori Kurang : 30-50

Kategori Cukup : 50-60

Kategori Baik : 60-70

Kategori Sangat Baik : 70-80

Kategori Memuaskan : 80-90

Kategori Sangat Memuaskan : 90-100

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah adalah :

$(\text{Realisasi anggaran} / \text{pagu anggaran}) \times 100\%$

3. Indeks Profesionalitas ASN adalah :

IP ASN Kriteria penilaian :

Kategori sangat rendah : <60

Kategori rendah : 61-70

Kategori sedang:71-80

Kategori tinggi : 81-90

Kategori sangat tinggi : 91-100

2. Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan adalah : Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai dokumen perencanaan 2025 – 2029 yaitu “Meningkatnya Kinerja Birokrasi” Sasaran tersebut memiliki 2 indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu “Nilai RB General” dan “Nilai SAKIP PD”, dengan formulasi perhitungannya

1. Indikator penilaian RB General terdiri dari 23 indikator penilaian yaitu : rencana aksi pembangunan RB general, tingkat implementasi rencana aksi RB general,

tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat maturitas SPIP. tingkat keberhasilan pembangunan ZI, nilai SAKIP, tingkat digitalisasi arsip, tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum, indeks pembangunan statistik, indeks tata kelola pengadaan, indeks sistem merit, indeks pelayanan publik, tingkat kepatuhan standar pelayanan publik, indeks SPBE, capaian IKU makro, capaian IKU non makro, opini BPK, tindak lanjut rekomendasi, indeks berAKhlak, survei penilaian integritas, survei kepuasan masyarakat,

Sasaran RB General: ,

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, dan
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional

- RB General:

Berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal IP guna menyelesaikan permasalahan tata Kelola birokrasi (“Isu Hulu”)

- Penilaian :

1. Capaian Sasaran Strategis, Bobot nilai 50
2. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB, Bobot nilai 40
3. Capaian Strategi Pelaksanaan RB General, Bobot nilai 10

- Kriteria :

Predikat Istimewa (AA) = > 90 – 100

Predikat Sangat Baik (A) = > 80 – 90

Predikat Baik (BB) = > 70 – 80

Predikat Cukup (B) = > 60 – 70

Predikat Cukup (CC) = > 50 – 60

Predikat Perlu Perbaikan (C) = > 30 – 50

Predikat Perlu Perbaikan(D) = 0 – 30

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah :

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Kriteria penilaian :

Kategori Sangat Kurang : 0-30

Kategori Kurang : 30-50

Kategori Cukup : 50-60

Kategori Baik : 60-70

Kategori Sangat Baik : 70-80

Kategori Memuaskan : 80-90

Kategori Sangat Memuaskan : 90-100

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2.A Perbandingan Realisasi Kinerja (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya rasio laba BUMD terhadap PAD	Rasio laba BUMD terhadap PAD	0,53	1,79	2,14	1,96	1,19	2,15	55,35%
3	Terwujudnya pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan	N/A	86,26	88,52	89,85	93,27	89,90	103,75%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,31	3,67	4,27	4,30	4,38	4,35	101%
5	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran serta akuntabel dengan kategori minimal baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersusunnya Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akuntabel	Nilai LPPD	N/A	2,53	3,29	3,29 (asumsi tahun 2023)	3,29 (asumsi tahun 2023)	2,67	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
7	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	44,79	N/A	82,12	82,12	67,69	82,17	82,38%
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	34,74	68,00	75,37	80,33	87,40	80,39	108,72%

No	Sasaran Lainnya	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83,98 (A)	85,43 (A)	85,74 (A)	86 (A)	86,19 (A)	86,16 (A)	100,03 %
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	93,71 %	93,71 %	94,07 %	94,08 %	93,04 %	94,10 %	98,87%
		Indeks Profesionalitas ASN	N/A	65,36	83,95	86,35 (tinggi)	86,33 (tinggi)	86,50 (tinggi)	99,80%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan	10 inovasi	10 inovasi	10 inovasi	14 Inovasi	14 Inovasi	14 Inovasi	100%

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang di laksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
2	Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen pendukung laporan kinerja pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas kebijakan reformasi hukum Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	N/A	68,1	67,12	77,70	86,38%
4	Meningkatnya laba BUMD	Persentase peningkatan laba BUMD	N/A	1,79%	2,14%	1,96%	1,19%	2,15%	55,35%
5	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah bidang administrasi pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya tingkat kematangan UKPBJ	Maturitas UKPBJ	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	100%
7	Meningkatnya kepatuhan standar pelayanan Pemerintah Daerah	Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik	74,36	78,50	87,05	93,85	93,85	93,86	99,99%
8	Terciptanya kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terciptanya akuntabilitas kinerja yang bersih dan terpercaya	Persentase PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan	N/A	81,52	82,86	97,24	94,,95	97,25	96,92%

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bagian Umum Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Umum	N/A	87,60	88,37	90,08	90,45	90,26	101,32
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	N/A	89,67	94,33	91,87	91,87	91,88	99,99%

Realisasi capaian indikator pada perjanjian kinerja tahun 2025 sesuai dokumen perencanaan periode 2021 – 2025 diperoleh hasil bahwa :

1. Indikator persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan diperoleh capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kebijakan yang telah ditetapkan antara lain : bantuan hibah berupa uang kepada lembaga, bantuan sosial insentif guru TPQ, dan bantuan sosial beasiswa masyarakat miskin dan berprestasi kepada perguruan tinggi swasta dan negeri. Keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
 - Adanya kerjasama dengan Lintas perangkat Daerah (Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, Cabang Dinas Pendidikan) dan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Mojokerto
 - Terjalinnya kerjasama dengan Lembaga Masyarakat (FKPKQ dan Koordinator Guru TPQ Di Kecamatan)
2. Indikator Rasio laba BUMD terhadap PAD diperoleh capaian kinerja tahun 2025 sebesar 55%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 2,15 dan realisasi sebesar 1,19. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang telah dialami, yaitu :
 - Kinerja keuangan belum optimal akibat kondisi pasar dan persaingan usaha yang semakin kompetitif
 - Masih adanya piutang usaha yang belum tertagih secara optimal sehingga mempengaruhi arus kas perusahaan

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi, yaitu:

- Memperkuat pembinaan dan pengawasan kinerja BUMD secara berkala
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap setiap kebijakan yang berkaitan dengan operasional perusahaan
 - Pemantauan dan evaluasi proses penyelesaian piutang bermasalah
 - Memperluas jaringan bisnis dan kerjasama BUMD
3. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan diperoleh capaian kinerja tahun 2025 sebesar 104%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 89,90 dan realisasi sebesar 93,27. Keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
- Peningkatan kualitas pelayanan publik berkelanjutan
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
4. Indikator Indeks Pelayanan Publik diperoleh capaian kinerja tahun 2025 sebesar 101%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 4,35 dan realisasi sebesar 4,38. Keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
- Pemanfaatan teknologi informasi, terutama melalui digitalisasi layanan dan pengembangan system pelayanan berbasis elektronik untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan.
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, guna mendukung kenyamanan, aksesibilitas dan efektivitas kepada masyarakat.
 - Penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan, termasuk pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan berkelanjutan
5. Indikator Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran serta akuntabel dengan kategori minimal baik diperoleh capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
- Penguatan koordinasi antar PD/UKPD untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi
 - Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan untuk memastikan struktur organisasi yang telah ditetapkan berjalan efektif dan mendukung capaian kinerja

- Penguatan implementasi SAKIP pada PD/UKPD melalui pendampingan asistensi teknis secara berkelanjutan
 - Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala termasuk pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar perbaikan kinerja PD/UKPD
6. Indikator Nilai LPPD diperoleh capaian kinerja tahun 2025 sebesar 105%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 3,14 dan realisasi sebesar 3,29 (asumsi tahun 2023). Hal ini dikarenakan belum ada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

Upaya yang telah dilaksanakan dalam penyusunan LPPD yaitu:

- Melaksanakan konsultasi teknis dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur terkait penyusunan LPPD
7. Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diperoleh capaian kinerja tahun 2025 sebesar 82%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 82,15 dan realisasi sebesar 67,69. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang telah dialami, yaitu :

- Keterbatasan waktu dan dukungan sumber daya
- Koordinasi antar PD/UKPD belum optimal

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi, yaitu:

- Penyusunan rencana aksi peningkatan indeks kualitas kebijakan
 - Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar PD/UKPD serta pemangku kepentingan
8. Indikator Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa diperoleh capaian kinerja tahun 2025 sebesar 108,79%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 80,33 dan realisasi sebesar 87,40. Keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
- Adanya tambahan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa melalui CPNS dan PPPK yang mana jumlah penambahan tersebut menjadikan jabatan fungsional PBJ diatas 60% dari rekomendasi jabatan fungsional PBJ LKPP

Tabel III.2.B Perbandingan Realisasi Kinerja (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2024	2025		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2024	2025		
1	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai RB General	76,24	75,46	76,30	98,90%
		Nilai SAKIP PD	86 (A)	86,19 (A)	86,16 (A)	100,03%

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi		Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2024	2025		
1	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LPPD	3,29	3,29 (asumsi tahun 2023)	2,67	100%
2	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	82,12	67,69	82,17	82,38%
3	Meningkatnya kinerja TPID Kabupaten Mojokerto	Nilai kinerja TPID	60	64,96	82,04	79,18%
4	Optimalnya tatakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	80,33	87,40	80,39	108,72%
5	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	82,12	67,69	82,17	82,38%
6	Meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai aspek pelaporan kinerja (SAKIP)	11,47	11,96	13	92%
7	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	N/A	51.96	50,4	103,09

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi		Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2024	2025		
8	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	93.85	93.85	98,91	94,88

Realisasi capaian indikator pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 sesuai dokumen perencanaan periode 2025 – 2029 diperoleh hasil bahwa :

Capaian indikator “Nilai RB General” di tahun 2025 sebesar 98,96%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 76,25 dan realisasi sebesar 75,46 dan capaian indikator “Nilai SAKIP PD” di tahun 2025 sebesar 100,09%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 86,11 dan realisasi sebesar 86,19

Analisis keberhasilan / ketidakberhasilan dalam mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- Pada indikator Nilai RB General tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 75,46 dengan capaian kinerja sebesar 98,96%. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB diperoleh hasil bahwa ada 5 (lima) subkomponen dan indikator penilaian yang nilainya turun yaitu :
 1. Sub komponen Strategi Pelaksanaan RB General dengan indikator Rencana Aksi Pembangunan RB General, skor tahun 2024 sebesar 2,3 sedangkan skor tahun 2025 sebesar 1,96
 2. Sub komponen Strategi Pelaksanaan RB General dengan indikator tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General, skor tahun 2024 sebesar 100 sedangkan skor tahun 2025 sebesar 86
 3. Sub komponen Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan skor tahun 2024 sebesar 82,12 sedangkan skor tahun 2025 sebesar 67.69
 4. Sub komponen Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Hukum skor tahun 2024 sebesar 77,62 sedangkan skor tahun 2025 sebesar 67.12
 5. Sub komponen capaian sasaran strategis reformasi birokrasi dengan indikator Survei Penilaian Integritas skor tahun 2024 sebesar 74,06 sedangkan skor tahun 2025 sebesar 72,47

Untuk itu diperlukan upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Penguatan koordinasi antar PD/UKPD
 2. Pemanfaatan data dan evaluasi berbasis bukti
 3. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan
- Pada indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah realisasi telah melebihi dari target yang ditetapkan. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu :
1. Penyelarasan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal
 2. Koordinasi yang baik antar Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah
 3. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja
 4. Adanya komitmen pimpinan

Berdasarkan Tabel III.2.B Perbandingan Realisasi Kinerja, secara umum realisasi Sekretariat Daerah mengalami peningkatan. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pada Sekretariat Daerah. Selain melakukan upaya untuk peningkatan kinerja, Sekretariat Daerah juga melakukan efisiensi sumber daya untuk mendukung *refocusing* prioritas pembangunan. Efisiensi tersebut berupa:

- Penghematan listrik dan air dengan mematikan komputer/AC/lampu/dll saat tidak digunakan;
- Penghapusan makan dan minum rapat internal;
- Efisiensi perjalanan dinas
- Efisiensi beberapa sub kegiatan yang tidak mendukung secara langsung terhadap prioritas pembangunan.

Program di lingkup Sekretariat Daerah yang mendukung prioritas pembangunan, yaitu:

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, Sekretariat Daerah akan melakukan beberapa rencana aksi, yaitu:

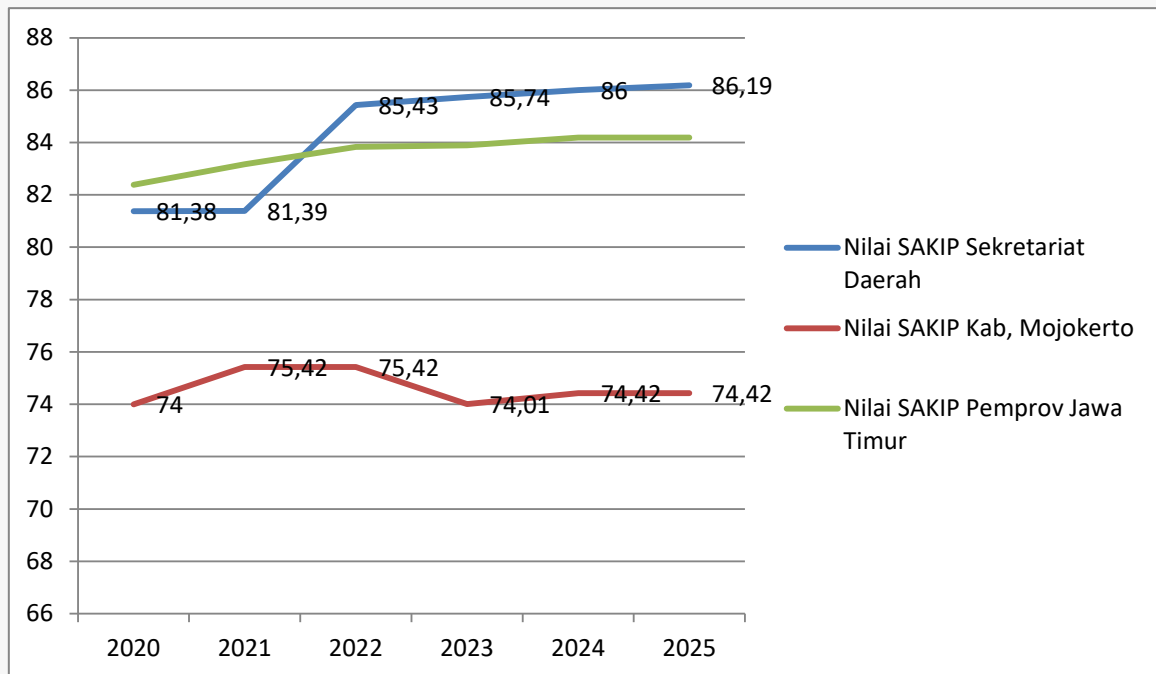
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala
- Komitmen setiap Bagian untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan
- Memberikan *reward* khusus kepada bagian dengan capaian kinerja tertinggi;

III.3. Prestasi Kinerja

Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Sekretariat Daerah, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi AKIP Sekretariat Daerah yang mendapatkan predikat A dengan nilai sebesar 86,19. Peningkatan kinerja juga dibuktikan melalui nilai SAKIP Sekretariat Daerah yang lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 86,10.

Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian, sebagai berikut:

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP



Tabel III.3 Perbandingan nilai SAKIP Sekretariat Daerah, Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	81,38 (A)	81,39 (A)	85,43 (A)	85,74 (A)	86,00 (A)	86,19 (A)
Nilai SAKIP Kab, Mojokerto	74,00 (BB)	75,42 (BB)	75,42 (BB)	74,01 (BB)	74,42 (BB)	75,67 (BB)

Nilai SAKIP Pemprov Jawa Timur	82,38 (A)	83,17 (A)	83,83 (A)	83,89 (A)	84,19 (A)	-
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---

*sumber data LHE AKIP

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai SAKIP Sekretariat Daerah tahun 2020 - 2021 diatas nilai SAKIP Kab. Mojokerto. Namun di bawah nilai SAKIP Pemprov Jawa Timur. Sedangkan realisasi tahun 2022 – 2025 diatas nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel III.4.A Perbandingan Realisasi Kinerja (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%	100%	-
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	1,19	1,19	-
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	93,27	90,87	-
4	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik	4,38	4,38	4,75
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%	100%	100%
6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	3,29 (asumsi tahun 2023)	3,29 (asumsi tahun 2023)	3,61 (asumsi tahun 2023)
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	67,69	67,69	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	87,40	91,92	90,92

Tabel III.4.B Perbandingan Realisasi Kinerja (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi
1	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai RB General	75,46	75,46	93,82
		Nilai SAKIP PD	86,19 (A)	75,67 (BB)	-

III.4 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah sebesar Rp.110.842.549.824,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 103.131.075.100,00 atau sebesar 93,04% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel III.5 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	56.786.671.930	52.695.106.180	92,79
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.955.221.515	1.803.538.540	92,24
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	52.100.656.382	48.632.430.380	93,34

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai RB General	76,25	75,46	98,96%	110.842.549.824	103.131.075.100	93,04%
		Nilai SAKIP PD	86,11	86,19	100,09%			
			Rata-rata capaian		99,52%	Total capaian		93,04%

Dengan capaian kinerja sebesar 100,04% dan capaian keuangan sebesar 93,04%, efisiensi kinerja Sekretariat Daerah sebesar 6,48%.

BAB IV PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Instansi kepada publik. Dengan disusunnya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk selalu konsisten dan berkelanjutan menjaga kualitas kinerjanya. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran. Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 memiliki 8 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja dan 2 sasaran kinerja lainnya dengan 4 (empat) indikator kinerja, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029 memiliki 1 sasaran strategis dan dengan 2 indikator kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 diperoleh hasil pengukuran evaluasi dan analisa kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja, dan 2 sasaran kinerja lainnya diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Utama pada perjanjian kinerja 2025 sesuai dokumen perencanaan 2021 - 2025 :
 1. Sasaran meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dengan indikator persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 93,81%.
 2. Sasaran meningkatnya rasio laba BUMD terhadap PAD dengan indikator rasio laba BUMD terhadap PAD diperoleh capaian kinerja sebesar 55,35% dan capaian anggaran sebesar 88,67%.
 3. Sasaran terwujudnya pelayanan administrasi umum, protokol dan komunikasi pimpinan yang responsif dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan

Komunikasi Pimpinan diperoleh capaian kinerja sebesar 104% dan capaian anggaran sebesar 92,12%.

4. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik diperoleh capaian kinerja sebesar 101% dan capaian anggaran sebesar 78,68%.
 5. Sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran serta akuntabel dengan kategori minimal baik diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 86,12%
 6. Sasaran tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dengan indikator nilai LPPD diperoleh capaian kinerja sebesar 105% dan capaian anggaran sebesar 85,46%.
 7. Sasaran meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintah Daerah dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diperoleh capaian kinerja sebesar 82% dan capaian anggaran sebesar 80,07%.
 8. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan indikator Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa diperoleh capaian kinerja sebesar 108,79% dan capaian anggaran sebesar 98,39%.
- b. Capaian kinerja tambahan pada perjanjian kinerja 2025 sesuai dokumen perencanaan 2021 - 2025 :
1. Sasaran meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator (1) Nilai SAKIP Sekretariat Daerah diperoleh capaian kinerja sebesar 100,09%, (2) Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah sebesar 98,87%, (3) Indeks Profesionalitas ASN sebesar 99,80%
 2. Sasaran optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan sebesar 100%
- Sedangkan capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 sesuai dokumen perencanaan 2025 - 2029 diperoleh hasil sebagai berikut
1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Birokrasi dengan indikator ; (1) Nilai RB General diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 98,96%; (2) Nilai SAKIP

Sekretariat Daerah diperoleh capaian kinerja sebesar 100,09% dan capaian anggaran sebesar 93,04%

IV.2. LANGKAH PERBAIKAN

Adapun langkah perbaikan demi meningkatkan kinerja di sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
1	Menetapkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029 sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku	Penetapan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029 sudah sesuai format dan ketentuan berlaku	Tahun 2025
2	Memastikan pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah hingga level individu pegawai	Pengukuran kinerja di Lingkup Sekretariat Daerah sudah dilaksanakan tiap bulan dari level pimpinan sampai level individu pegawai	Tahun 2025
3	Mengintegrasikan hasil laporan berkala dalam penyesuaian aktivitas agar pencapaian kinerja lebih efektif dan tepat sasaran	Akan dilaksanakan pengintegrasian hasil laporan berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja lebih efektif dan tepat sasaran	Tahun 2025
4	Mengoptimalkan penggunaan laporan kinerja berkala sebagai acuan dalam penyesuaian anggaran guna mendukung pencapaian kinerja yang lebih efektif	Akan dilaksanakan penyusunan laporan kinerja berkala sebagai acuan dalam penyesuaian anggaran	Tahun 2025
5	Menyempurnakan evaluasi akuntabilitas kinerja atas sasaran strategis Perangkat Daerah yang disajikan pada laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan menyajikan upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan atas capaian kinerja sampai dengan sub kegiatan	LKJIP Sekretariat Daerah sudah menyajikan upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan atas capaian kinerja sampai dengan sub kegiatan	Tahun 2025
6	Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal dalam perbaikan dan peningkatan kinerja output	Hasil evaluasi AKIP internal akan dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja output	Tahun 2025
	Mengimplementasikan dan	Tindak lanjut hasil evaluasi	Tahun 2025

	memanfaatkan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam rangka perbaikan sistem internal Perangkat Daerah, serta menyusun bukti dukung yang memadai atas perbaikan yang dilaksanakan	AKIP Internal akan diimplementasikan dan dimanfaatkan dalam rangka perbaikan sistem internal PD	
8	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, diantaranya dengan merumuskan hasil efisiensi perangkat daerah tahun lalu dalam mendukung peningkatan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan pada sasaran strategis dan menguraikan faktor penyebab efisiensi	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sudah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi dan efektifitas perangkat daerah	Tahun 2025

LAMPIRAN

Yang perlu dilampirkan untuk LKj:

1. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025.
2. Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025.
3. LHE AKIP Tahun 2025
4. Laporan evaluasi Renja (E-81) sd tribulan IV Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto
5. Cascading periode perencanaan 2025-2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

✓ dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196803271988091002

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	2,15
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	89,90
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,35
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%
6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	3,15 (Sedang)
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,15
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	80,34

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	86,11
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,10%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	86,50 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	14 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.098.351.803,00	APBD 2025
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	36.336.198.060,00	APBD 2025
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.976.025.112,00	APBD 2025

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196803271988091002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Teguh Gunarko
Jabatan: Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Sekretaris Daerah
Kabupaten Mojokerto

Teguh Gunarko

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	100%
2	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD	Rasio Laba BUMD terhadap PAD	2,15
3	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	89,90
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,35
5	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori Minimal Baik	100%
6	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai LPPD	3,15 (Sedang)
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,15
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	80,34

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	86,11
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,10%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	86,50 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		14 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.098.351.803,00	APBD 2025
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	36.336.198.060,00	APBD 2025
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.976.025.112,00	APBD 2025

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Sekretaris Daerah
Kabupaten Mojokerto



Muhammad Albarraa



Teguh Gunarko



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Teguh Gunarko
Jabatan: Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Sekretaris Daerah
Kabupaten Mojokerto


Muhammad Albarraa


Teguh Gunarko

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai RB General	76,25
		Nilai SAKIP PD	86,11

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 52.100.656.382	PAPBD 2025
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 56.786.671.930	PAPBD 2025
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.955.221.515	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Sekretaris Daerah
Kabupaten Mojokerto


Muhammad Albarraa


Teguh Gunarko



KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : 700/492.47/416-034/2025
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi (AKIP) Tahun 2025

Mojokerto, 15 September 2025

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

di

Mojokerto

Dengan ini kami sampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus Evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi penilaian atas keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Evaluasi AKIP mulai tahun 2025 dilaksanakan melalui aplikasi Penilaian Mandiri Internal (PMI) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Mojokerto Nomor 069.5/4301/416-034/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Langkah ini dilakukan agar penilaian evaluasi AKIP terintegrasi, terdokumentasi lebih baik, lebih transparan, akuntabel dan objektif, sehingga mendapatkan hasil evaluasi yang lebih berkualitas. Selain adanya evaluasi berbasis elektronik juga didukung Tim Evaluasi AKIP kolaborasi dari Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi pada komponen evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/244 /HK/416-012/2025.

2. Komponen dan Penilaian Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan nilai sebesar **86,19** dengan predikat **A (Memuaskan)**.

Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,50	25,34
b. Pengukuran Kinerja	30,00	25,50	26,42
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	13,44
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	23,00	20,99
Jumlah	100,00	86,00	86,19

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan

pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,34** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Renstra 2025-2029 belum ditetapkan karena saat evaluasi sapip berlangsung, RPJMD 2025-2029 belum disahkan.
- 2) Perencanaan Kinerja sudah cukup selaras. Kedepannya mohon dapat menjaga konsistensi serta meningkatkan perencanaan kinerja di lingkup perangkat daerah.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,42** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Pengukuran Kinerja sudah cukup baik. Kedepannya mohon dapat meningkatkan pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah hingga level individu pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,44** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- 2) Laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi internal perangkat daerah secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta upaya pemanfaatan hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,99** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tersebut sebagai berikut :

- 1) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas sasaran strategis disajikan pada dokumen LKjIP. Akan tetapi, evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara mendalam karena Perangkat Daerah belum menganalisa upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan atas capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan sub kegiatan
- 2) Hasil evaluasi Akip Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja output ada sebagian output program yang tidak tercapai
- 3) Perangkat Daerah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Tahun 2024. Namun, hasil tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil Dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan Dalam Mendukung Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja karena masih terdapat IKU yang belum tercapai dan belum diuraikan faktor penyebab efisiensi

4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang **direkomendasikan** kepada Tim AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menetapkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku

2. Pengukuran Kinerja

- a. Memastikan pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah hingga level individu pegawai.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Mengintegrasikan hasil laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas agar pencapaian kinerja lebih efektif dan tepat sasaran.
- b. Mengoptimalkan penggunaan laporan kinerja berkala sebagai acuan dalam penyesuaian anggaran guna mendukung pencapaian kinerja yang lebih efektif.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menyempurnakan evaluasi akuntabilitas kinerja atas sasaran strategis perangkat daerah yang disajikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan menyajikan upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan atas capaian kinerja sampai dengan sub kegiatan
- b. Memanfaatkan hasil evaluasi Akip Internal dalam perbaikan dan peningkatan kinerja output
- c. Mengimplementasikan dan memanfaatkan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam rangka perbaikan sistem internal perangkat daerah, serta menyusun bukti dukung yang memadai atas perbaikan yang dilaksanakan.
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, diantaranya dengan merumuskan hasil efisiensi perangkat daerah tahun lalu dalam mendukung peningkatan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan pada sasaran strategis dan menguraikan faktor penyebab efisiensi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Kami minta agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan upaya yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

a.n. Bupati Mojokerto
Sekretaris Daerah,



Teguh Gunarko

Tembusan:

1. Bapak Bupati
2. Tim Evaluasi SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode 61318 Jawa Timur
Telepon (0321) 321472 Faksimile (0321) 327373
Laman : <http://www.mojokertokab.go.id>

Mojokerto, 2 Februari 2026

Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Mojokerto

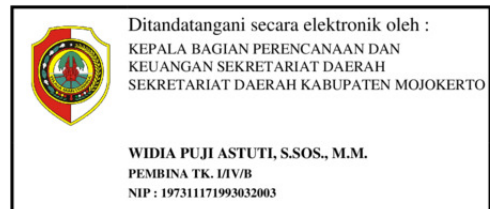
di

MOJOKERTO

SURAT PENGANTAR
NOMOR: 477/262/416-032/2026

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) s/d Tribulan IV Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto (Form E-81).	Satu Berkas	Demikian untuk menjadi periksa.

an. Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum
u.b..
Kepala Bagian Perencanaan dan
Keuangan,



Tembusan : Sekretaris Daerah Kab. Mojokerto
(sebagai laporan).

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran per			
				K	R	K	R	K	R	I		II	
1	2	3	4	5		6		7		8		9	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
1	Meningkatnya pembinaan pendidikan dan mental spiritual yang berkepribadian yang berdaya tahan terhadap globalisasi		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)()					75,48					
		[PROGRAM] 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang di laksanakan(Kebijakan)		86.839.034.421,00		107.611.735.592,00	3,00	52,106,342,550.00		12,342,414,650.00		10,076,599,250.00
		[KEGIATAN] 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat(%)		55.580.999.421,00		107.611.735.592,00	98,00	52,106,342,550.00		12,342,414,650.00		10,076,599,250.00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual(Dokumen)					5,00	1,395,996,650.00	1,00	178,985,650.00	1,00	552,273,850.00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB(Dokumen)					5,00	50,469,210,900.00	0,00	12,089,301,400.00	1,00	9,465,402,600.00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas(Dokumen)					2,00	241,135,000.00	0,00	74,127,600.00	0,00	58,922,800.00
2	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)(sedang)					2,62					
		[PROGRAM] 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemenuhan Dokumen Pendukung Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(%)		8.600.000.000,00		4.640.220.267,00	100,00	2.944.872.500,00	25,00	100.000.000,00	25,00	0,00
		[KEGIATAN] 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah PD yang difasilitasi dan termonitoring laporan kinerjanya sesuai ketentuan (PD)		6.184.423.750,00		28,00	28,00	1.110.115.000,00		100.000.000,00		0,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan(Dokumen)				1,00	1,00	140.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan(Dokumen)				26,00	26,00	438.448.500,00	6,00	0,00	6,00	0,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah(Dokumen)				12,00	12,00	531.266.500,00	3,00	100.000.000,00	3,00	0,00
		[KEGIATAN] 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase peningkatan implementasi kerja sama dalam negeri yang efektif dan saling menguntungkan di semua bidang kerjasama(persen)		3.399.847.200,00			95,00	1.834.757.500,00		0,00		0,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri(Dokumen)				60,00	60,00	1.834.757.500,00	10,00	0,00	15,00	0,00
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan(indeks)					60,00	1,834,757,500.00	10,00	0,00	15,00	0,00
		[PROGRAM] 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum(indeks)		0,00		4.406.681.473,00	77,65	1.735.456.880,00		213.904.710,00		337.030.749,00
		[KEGIATAN] 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti(%)		376.998.500,00		4.406.681.473,00	100,00	1.735.456.880,00	20,00	213.904.710,00	30,00	337.030.749,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun(Dokumen)					745,00	401,195,750.00		39,369,105.00		97,934,280.00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum(Kasus)					15,00	464,914,680.00		61,229,205.00		156,727,869.00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi(Dokumen)					785,00	869,346,450.00	0,00	113,306,400.00	0,00	82,368,600.00
4	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD		Rasio Laba BUMD terhadap PAD(%)					2,14					
		[PROGRAM] 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan laba BUMD(Persen)		7.500.000.000,00		2.031.927.634,00	15,66	644,390,550.00		85,630,200.00		150,879,300.00
		[KEGIATAN] 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tingkat Kesehatan BUMD()		3.000.000.000,00		1.800.563.666,00	3,69	437,173,450.00		56,200,900.00		104,441,500.00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD(Dokumen)					2,00	253,726,550.00		14,982,000.00		55,486,300.00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian(Laporan)					1.00	155,848,000.00		28,320,000.00		42,725,200.00
	[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil(Dokumen)					1.00	27,598,900.00		12,898,900.00		6,230,000.00
	[KEGIATAN] 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan SDA yang dilaksanakan(kebijakan)		4.500.000.000,00		231.363.968,00	1.00	207,217,100.00		29,429,300.00		46,437,800.00
	[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja(Dokumen)					1.00	175,000,000.00		16,500,000.00		39,400,000.00
	[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan(Dokumen)					1.00	32,217,100.00		12,929,300.00		7,037,800.00
5	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)(Indeks)					73.00					
	[PROGRAM] 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan(%)		6.154.563.698,00		2.338.600.439,00	100.00	979,539,962.00	25.00	79,479,600.00	25.00	200,144,704.00
	[KEGIATAN] 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Ditetapkan(%)		6.154.563.698,00		2.338.600.439,00	100.00	979,539,962.00	25.00	79,479,600.00	25.00	200,144,704.00
	[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah(Dokumen)					1.00	142,446,000.00	0.00	15,552,500.00	0.00	43,789,099.00
	[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan(Laporan)					3.00	716,071,800.00	0.00	56,966,700.00	0.00	116,555,305.00
	[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan(Laporan)					12.00	121,022,162.00	3.00	6,960,400.00	3.00	39,800,300.00
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa(indeks)					75.50					
	[PROGRAM] 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Maturitas UKPBJ(level)		2.905.000.000,00		1.817.816.159,00	3.00	331,291,000.00		61,006,300.00		88,450,700.00
	[KEGIATAN] 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses pengadaan barang/jasa selesai tepat waktu sesuai rencana pengadaan yang ditetapkan(%)		2.905.000.000,00		1.817.816.159,00	97.00	331,291,000.00		61,006,300.00		88,450,700.00
	[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa(Dokumen)					20.00	120,842,300.00		18,946,300.00		37,580,000.00
	[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik(Dokumen)					3.00	94,276,900.00		20,930,000.00		22,740,700.00
	[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa(Orang)					350.00	116,171,800.00		21,130,000.00		28,130,000.00
4	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan(indeks)					87.90					
2	[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Umum(indeks)		0,00		62.785.618.652,00	87,60	20.902.855.800,00		3.638.836.945,00		5.194.075.605,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian yang terpenuhi(%)		150.000.000,00	146.355.120,00	95,00	1.500.000,00		1.500.000,00		0,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)				30,00	1.500.000,00	30,00	1.500.000,00	30,00	0,00
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi bagian umum(%)		20.080.000.000,00	27.460.156.037,00	95,00	9.531.233.761,00		1.000.641.000,00		3.015.421.320,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)				3,00	303.240.000,00	0,00	150.000.000,00	1,00	21.000.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				7,00	2.668.136.728,00	1,00	153.635.000,00	2,00	955.695.170,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)				14,00	1.188.528.833,00	2,00	98.783.500,00	4,00	326.477.300,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik/Kantor yang disediakan(Paket)				12,00	411.820.750,00	3,00	75.360.000,00	3,00	150.000.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)				12,00	4.959.507.450,00	3,00	522.862.500,00	3,00	1.562.248.850,00
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi(%)		1.500.000.000,00	7.938.539.860,00	100,00	3.229.610.675,00		1.300.000.000,00		0,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan(Unit)				6,00	3.229.610.675,00	2,00	1.300.000.000,00	3,00	0,00
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi Bagian Umum(%)		570.000.000,00	0,00	100,00			0,00		0,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Laporan)				12,00					
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara (%)		18.595.000.000,00	19.740.281.987,00	75,00	5.893.511.364,00		798.042.445,00		1.580.550.885,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)				7,00	896.200.000,00	2,00	167.718.000,00	2,00	162.240.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)				32,00	1.659.350.000,00	8,00	347.567.900,00	8,00	335.853.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)				250,00	168.502.000,00	64,00	24.574.375,00	62,00	51.514.375,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				3,00	1.936.450.000,00	0,00	202.876.350,00	1,00	667.710.050,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				2,00	753.649.364,00	0,00	39.298.580,00	1,00	160.933.900,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				2,00	479.360.000,00	0,00	16.007.240,00	1,00	202.299.560,00
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi(%)		700.000.000,00	383.552.392,00	100,00	125.000.000,00		20.000.000,00		42.058.500,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Orang)				8,00	125.000.000,00	2,00	20.000.000,00	2,00	42.058.500,00
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahaan Sekretaris Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahaan Sekretaris Daerah(%)		5.650.000.000,00	7.116.733.256,00	90,00	2.122.000.000,00		518.653.500,00		556.044.900,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan(Paket)				12,00	950.000.000,00	3,00	229.046.300,00	3,00	260.705.700,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan(Paket)				12,00	700.000.000,00	3,00	173.291.900,00	3,00	196.589.300,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan(Paket)				12,00	472.000.000,00	3,00	116.315.300,00	3,00	98.749.900,00
8	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori minimal Baik(%)		7.180.500.000,00	2.374.273.948,00	100,00	796.858.170,00		105.809.850,00		183.097.750,00
		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(PD/UKPD)		0,00	2.374.273.948,00	48,00	796.858.170,00		105.809.850,00		183.097.750,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)				2,00	81.373.500,00		12.809.150,00		38.297.400,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Persentase PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik(%)				100,00		?			
		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik(PD/UKPD)	0,00		2.374.273.948,00	48,00	796.858.170,00		105.809.850,00		183.097.750,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)				6,00	437.724.565,00		23.638.000,00		79.237.250,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(Dokumen)				4,00	50.000.000,00		38.864.400,00		4.897.800,00
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik(Indeks)				4,35					
		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik(Nilai)	7.180.500.000,00		2.374.273.948,00	93,86	796.858.170,00		105.809.850,00		183.097.750,00
		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik(PD/UKPD)	0,00		2.374.273.948,00	57,00	796.858.170,00		105.809.850,00		183.097.750,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)				3,00	100.613.435,00		15.927.900,00		36.322.400,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Dokumen)				4,00	127.146.670,00		14.570.400,00		24.342.900,00
10	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Indeks)				87,90					
		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan(indeks)	0,00		87.137.950.855,00	85,75	28.488.442.637,00		7.120.986.563,00		9.140.845.812,00
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi(%)	69.000.000,00		131.445.538,00	100,00	52.950.000,00		5.780.000,00		3.600.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				12,00	28.480.000,00		4.300.000,00		0,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				16,00	24.470.000,00		1.480.000,00		3.600.000,00
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi(%)	79.086.017.211,00		81.782.346.886,00	100,00	23.105.721.000,00		5.966.045.307,00		7.701.880.107,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				1.960,00	23.015.721.000,00		5.966.045.307,00		7.698.804.107,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)				75,00	90.000.000,00		0,00		3.076.000,00
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi(%)	851.000.000,00		733.889.877,00	100,00	164.270.500,00		1.850.000,00		162.420.500,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)				2,00	164.270.500,00		1.850.000,00		162.420.500,00
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi bagian perencanaan dan keuangan(%)	5.709.000.000,00		6.684.138.731,00	100,00	2.035.198.697,00		395.584.788,00		476.630.874,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				3,00	317.711.497,00		12.225.000,00		36.801.300,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)				108,00	40.437.200,00		9.492.600,00		10.492.600,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				1,00	187.050.000,00		1.000.000,00		170.401.400,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12,00	1.490.000.000,00		372.867.188,00		258.935.574,00
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi Bagian Perencanaan dan Keuangan(%)	1.666.950.000,00		1.550.672.834,00	100,00	429.480.900,00		83.186.906,00		107.656.898,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				12,00	177.184.000,00		41.356.906,00		44.276.898,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12,00	252.296.900,00		41.830.000,00		63.380.000,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang terpenuhi(%)		3.840.546.880,00		8.262.830.522,00	100,00	2.700.821.540,00		668.539.562,00		688.657.433,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Orang/Bulan)					28,00	1.126.404.840,00		426.589.562,00		252.257.433,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan(Paket)					3,00	263.416.700,00		0,00		114.450.000,00
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Orang/Bulan)					360,00	1.311.000.000,00		241.950.000,00		321.950.000,00
11	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Indeks)				91,87						
		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Indeks)	86	8.497.973.000		5.187.923.505,00	85,00	1.912.499.775,00		286.313.600,00		498.630.396,00
		[KEGIATAN] 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan fasilitasi keprotokol dan komunikasi pimpinan(%)	98	8.497.973.000		5.187.923.505,00	98,00	1.912.499.775,00	24,00	286.313.600,00	24,00	498.630.396,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol(Laporan)	900	2.066.571.750			300,00	665.552.315,00	75,00	124.980.000,00	75,00	194.778.096,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan(Laporan)	1950	4.592.452.000			700,00	842.425.460,00	156,00	114.791.200,00	165,00	195.439.900,00
		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan(Laporan)	756	1.838.949.250			300,00	404.522.000,00	63,00	46.542.400,00	63,00	108.412.400,00
	[Target Capaian Sub Kegiatan]												
	Bagian	Tribulan	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]			[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Tribulan Berikutnya]					
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tribulan 1	Adanya Kepastian jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sinergitas Lintas Sektor	Sedang dalam Proses Putusan Pimpinan Daerah tentang Penerima Hibah dan Beasiswa Masyarakat Miskin Berprestasi (SK Bupati tentang Penerima Hibah, dan Penerima Bansos Beasiswa Masyarakat Miskin Berprestasi) (sub Kegiatan Palaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial).	melaksanakan koordinasi baik intern perangkat daerah maupun dengan perangkat daerah terkait			melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan kegiatan sub kegiatan perangkat daerah pendukung visi misi Kepala Daerah yang belum tercukupi dalam APBD agar dapat diusulkan dalam APBD					
		Tribulan 2	Adanya Kepastian jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sinergitas Lintas Sektor	Sedang dalam Proses Putusan Pimpinan Daerah tentang Penerima Hibah dan Beasiswa Masyarakat Miskin Berprestasi (SK Bupati tentang Penerima Hibah, dan Penerima Bansos Beasiswa Masyarakat Miskin Berprestasi) (sub Kegiatan Palaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial).	Sejara melaksanakan Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring kepada Lembaga atau Individu yang mengajukan bantuan, sebagai Dasar Pencairan Bantuan.			melakukan inventarisasi kebutuhan yang mendukung visi-misi kepala daerah					
		Tribulan 3	Adanya Kepastian jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sinergitas Lintas Sektor	(1) Menyesuaikan Jadwal Kegiatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan, (2) Terlambatnya Penerima Hibah mengajukan Proposal Pencairan pada PAPBD 2025	(1) melaksanakan koordinasi baik intern perangkat daerah maupun dengan perangkat daerah terkait, (2) Melakukan Pemberitahuan kepada Penerima Hibah PAPBD 2025 melalui Surat Elektronik kepada Kecamatan terkait								
		Tribulan 4	terlaksananya kerjasama dan sinergitas dengan baik pada Bagian Kesra, lintas sektor OPD maupun diluar lintas OPD	perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak menentu	melakukan koordinasi, Kerjasama, sinergitas intern maupun ekstern Bagian Kesra dengan baik, sehingga tercapainya indikator Kinerja dengan tepat waktu dan kualitas kinerja yang baik								

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2	Bagian Pemerintahan	Tribulan 1	Adanya sinergitas aparatur pada Bagian Pemerintahan	Menunggu kebijakan puncak pimpinan daerah yang baru	Lebih ditingkatkan sinergitas dalam melaksanakan tugas	Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mendukung visi dan misi pimpinan baru														
		Tribulan 2	Adanya sinergitas aparatur pada Bagian Pemerintahan	Kegiatan harus dapat menyesuaikan visi misi Kepala Daerah	Lebih ditingkatkan sinergitas dalam melaksanakan tugas	Kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung visi dan misi pimpinan baru														
		Tribulan 3		Kolaborasi antar Sub Kegiatan dan jika memungkinkan lintas unit kerja yang mempunyai kontribusi kinerja yang selaras	UP Bagian Pemerintahan Terbatas, sehingga banyak kegiatan yang metode pencairannya menggunakan LS dan membutuhkan waktu	Lebih ditingkatkan sinergitas dalam melaksanakan tugas														
		Tribulan 4	Kolaborasi antar Sub Kegiatan dan jika memungkinkan lintas unit kerja yang mempunyai kontribusi kinerja yang selaras	UP Bagian Pemerintahan Terbatas, sehingga banyak kegiatan yang metode pencairannya menggunakan LS dan membutuhkan waktu	Lebih ditingkatkan sinergitas dalam melaksanakan tugas	Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mendukung visi dan misi Kepala Daerah														
3	Bagian Hukum	Tribulan 1	1. Pengembangan teknologi informasi dalam kegiatan publikasi produk hukum melalui media elektronik. 2. Peningkatan pembinaan hukum bagi penyelenggara pemerintahan.	1. Terjadi perubahan kebijakan peraturan dari pemerintah pusat/daerah, dalam pelaksanaan tugas overlapping dari pemerintah pusat. 2. Terlambatnya laporan dari instansi lain yang mengakibatkan lambatnya produk yang dihasilkan.	1. Update data produk hukum dalam website jdih.mojokertokab.go.id 2. Bantuan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. 3. Penyelesaian Raperda yang dibahas untuk menjadi Perda	1. Update data produk hukum pada website jdih.mojokertokab.go.id 2. Bantuan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas produk hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah.														
		Tribulan 2	1. Pengembangan teknologi informasi dalam kegiatan publikasi produk hukum melalui media elektronik. 2. Peningkatan pembinaan hukum bagi penyelenggara pemerintahan.	1. Terjadi perubahan kebijakan peraturan dari pemerintah pusat/daerah, dalam pelaksanaan tugas overlapping dari pemerintah pusat. 2. Terlambatnya laporan dari instansi lain yang mengakibatkan lambatnya produk yang dihasilkan.	1. Update data produk hukum dalam website jdih.mojokertokab.go.id 2. Bantuan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. 3. Penyelesaian Raperda yang dibahas untuk menjadi Perda	1. Update data produk hukum pada website jdih.mojokertokab.go.id 2. Bantuan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas produk hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah.														
		Tribulan 3	Pengembangan website jdih.mojokertokab.go.id	Keterlambatan laporan dari perangkat daerah yang mengakibatkan lambatnya produk hukum yang dihasilkan	Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah															
		Tribulan 4	Peningkatan kapasitas SDM dalam menjalankan Tusi Perangkat Daerah	Terjadinya perubahan regulasi kebijakan di tingkat pusat, daerah melaksanakan penyesuaian	Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan yang dilaksanakan															
4	Bagian Perekonomian dan SDA	Tribulan 1	Mudahnya koordinasi antar PD/UKPD	Sulitnya koordinasi terkait PD/UKPD	Kedepannya akan lebih insentif koordinasi kepada PD/UKPD lintas sektor	Kedepannya akan lebih insentif koordinasi kepada PD/UKPD lintas sektor														
		Tribulan 2	Mudahnya koordinasi antar PD/UKPD	Sulitnya koordinasi terkait PD/UKPD	Kedepannya akan lebih insentif koordinasi kepada PD/UKPD lintas sektor	Kedepannya akan lebih insentif koordinasi kepada PD/UKPD lintas sektor														
		Tribulan 3	Mudahnya koordinasi antar PD/UKPD	Sulitnya koordinasi terkait PD/UKPD	Kedepannya akan lebih insentif koordinasi kepada PD/UKPD lintas sektor															
		Tribulan 4																		
5	Bagian Administrasi Pembangunan	Tribulan 1	inisiatif; kreatif dan kerjasama tim	tidak aktif bekerja; kurang inisiatif dan keterbatasan SDM Teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan	1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis dan memaksimalkan SDM yang ada serta silakukan Pemantauan kinerja secara berkala 2. Dilakukan adanya pergeseran/mutasi staf dari OPD lain	penyusunan perencanaan dengan baik														
		Tribulan 2	inisiatif; kreatif dan kerjasama tim	Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, Kurangnya sarana dan prasarana kerja	menyesuaikan rencana kerja, meningkatkan sarana dan prasarana Pengadaan atau perbaikan alat kerja dan teknologi pendukung.	Penguatan Komunikasi dan Koordinasi, Penetapan Target Tribulan Baru														

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		Tribulan 3	1.Koordinasi antar perangkat daerah berjalan baik dan Dukungan pimpinan dalam penyusunan program sangat baik. 2. tersedianya data hasil survei untuk penyusunan peta jalan lingkungan dan JUT 3. Komitmen dan Dukungan data dari beberapa OPD sudah tersedia.	1.Sebagian kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah penetapan Perubahan APBD dan adanya regulasi dari Pemerintah Pusat sehingga perlu adanya penyesuaian terkait juknis. 2. Tambahan anggaran baru diterima pada Perubahan APBD sehingga perlu perencanaan ulang jadwal kegiatan dan Waktu pelaksanaan menjadi terbatas 3. Beberapa kegiatan pelaporan baru bisa dilaksanakan setelah adanya tambahan anggaran Perubahan APBD. Waktu penyusunan laporan cukup terbatas.	1. Menyusun percepatan pelaksanaan kegiatan dan Penguatan pendampingan teknis penyusunan program sesuai regulasi dari Pemerintah Pusat 2. Segera melaksanakan kegiatan evaluasi sesuai rencana baru dan Mempercepat koordinasi OPD terkait agar target dapat tercapai hingga akhir tahun 3. Menyusun strategi percepatan penyelesaian laporan dan Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-Monev agar lebih efisien.	melakukan monev kegiatan yang belum terealisasi dan dilaksanakan di PAPBD								
		Tribulan 4	1.Koordinasi antar perangkat daerah berjalan baik dan Dukungan pimpinan dalam penyusunan program sangat baik. 2. tersedianya data hasil survei untuk penyusunan peta jalan lingkungan dan JUT 3. Komitmen dan Dukungan data dari beberapa OPD sudah tersedia.	1.Sebagian kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah penetapan Perubahan APBD dan adanya regulasi dari Pemerintah Pusat sehingga perlu adanya penyesuaian terkait juknis. 2. Tambahan anggaran baru diterima pada Perubahan APBD sehingga perlu perencanaan ulang jadwal kegiatan dan Waktu pelaksanaan menjadi terbatas 3. Beberapa kegiatan pelaporan baru bisa dilaksanakan setelah adanya tambahan anggaran Perubahan APBD. Waktu penyusunan laporan cukup terbatas.	Menyusun percepatan pelaksanaan kegiatan dan Penguatan pendampingan teknis penyusunan program sesuai regulasi dari Pemerintah Pusat 2. Segera melaksanakan kegiatan evaluasi sesuai rencana baru dan Mempercepat koordinasi OPD terkait agar target dapat tercapai hingga akhir tahun 3. Menyusun strategi percepatan penyelesaian laporan dan Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-Monev agar lebih efisien.	Penguatan Komunikasi dan Koordinasi, Penetapan Target Triwulan Baru								
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tribulan 1	1. Mengintensikan konsultasi dan koordinasi dengan LKPP , Pengadaan Barang dan Jasa provinsi maupun Kab/kota lain ; 2. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) handal tanpa trouble akan memberikan kemudahan dalam penginputan SIRUP dan pencatatan pada Perangkat daerah ; 3. Updating aturan-aturan baru terkait pengadaan barang dan jasa	1. Pada Tw 1 proses tender belum maksimal , karena perangkat daerah masih mempersiapkan dokumen - dokumen tender ; 2. Pengetahuan dan kompetensi Sumber daya Manusia terkait pengadaan barang dan jasa perlu ditingkatkan ; 3. Regulasi pengadaan barang dan jasa yang bersifat dinamis ;	melakukan koordinasi intern untuk memenuhi target kinerja	melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sub kegiatan yang mendukung visi misi prioritasBupati Kabupaten Mojokerto								
		Tribulan 2	1. koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait ; 2. monitoring berkala pada aplikasi SPSE ; 3. sosialisasi terhadap regulasi terbaru pengadaan barang dan jasa	1. pada tw 2 belum semua perangkat daerah melakukan proses tender ; 2. belum maksimalnya Pengetahuan pengadaan barang dan jasa yg dimiliki perangkat daerah ; 3. peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat dinamis	melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar dapat mencapai output dan sesuai target kinerja	Melakukan inventarisasi kegiatan yang diprioritaskan tetapi belum terakomodir di apbd untuk diusulkan pada papbd								
		Tribulan 3	1. optimalisasi pelaksanaan timescadule pengadaan barang dan jasa ; 2. monitoring pencatatan secara berkala pada aplikasi SPSE ; 3. bimbingan teknis kepada pelaku pengadaan barang dan jasa atas keluarnya aturan baru	1. efisiensi anggaran ; 2. belum optimalnya pencatatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ; 3. peraturan pengadaan barang dan jasa yang selalu dinamis	penjadwalan ulang kegiatan yang belum selesai, serta koordinasi dengan dinas terkait									
		Tribulan 4	1. monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengadaan tahun berjalan 2. kesesuaian RUP dengan paket yang akan dilaksanakan 3. percepatan penyesuaian terhadap regulasi terbaru	1. Keterbatasan waktu pelaksanaan pengadaan pada akhir tahun anggaran 2. Belum optimalnya finalisasi pencatatan data pada aplikasi SPSE 3. Perubahan regulasi PBJ yang dinamis memerlukan peningkatan pembinaan dan advokasi	Melakukan evaluasi capaian kinerja dan finalisasi kegiatan, serta koordinasi dengan perangkat daerah	Melakukan evaluasi akhir pelaksanaan Renja dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya								
7	Bagian Umum	Tribulan 1	Sesuai Anggaran Kas	Proses Persiapan Pengadaan Sesuai Kebutuhan	Menyesuaikan Kebutuhan sesuai Permintaan	Mengusulkan Penambahan Anggaran Sesuai Kebutuhan								

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		Tribulan 2	Sesuai Anggaran Kas	Proses Persiapan Pengadaan Sesuai Kebutuhan	Menyesuaikan Kebutuhan sesuai Permintaan	Mengusulkan Penambahan Anggaran Sesuai Kebutuhan								
		Tribulan 3		Sesuai Anggaran Kas	Pergantian KPA	Membuat Surat Perubahan Akun KPA								
		Tribulan 4	Efisiensi sesuai Kebutuhan Pengadaan	Terdapat 1 sub kegiatan yang anggarannya dialihkan ke Sub Kegiatan lain	sudah sesuai dengan Anggaran Kas									
8	Bagian Organisasi	Tribulan 1	Kompetensi, tanggung jawab, kolaborasi tim internal maupun eksternal serta sumber daya yg mencukupi	Adanya perubahan fokus kegiatan pada tahun berjalan yang menyesuaikan dengan kebijakan refocusing sehingga berimbang pada ketepatan realisasi anggaran	Menyesuaikan kembali timeline rencana kegiatan	Menyesuaikan target kinerja dengan sumber daya /anggaran								
		Tribulan 2	Kompetensi, tanggung jawab, kolaborasi tim internal maupun eksternal serta sumber daya yg mencukupi	Adanya perubahan fokus kegiatan pada tahun berjalan yang menyesuaikan dengan kebijakan refocusing sehingga berimbang pada ketepatan realisasi anggaran	Menyesuaikan kembali timeline rencana kegiatan	Menyesuaikan target kinerja dengan sumber daya /anggaran								
		Tribulan 3	Kompetensi, tanggung jawab, kolaborasi tim internal maupun eksternal serta sumber daya yg mencukupi	Adanya perubahan fokus kegiatan pada tahun berjalan yang menyesuaikan dengan kebijakan refocusing sehingga berimbang pada ketepatan realisasi anggaran	Menyesuaikan kembali timeline rencana kegiatan	Menyesuaikan target kinerja dengan sumber daya /anggaran								
		Tribulan 4	Kompetensi, tanggung jawab, kolaborasi tim internal maupun eksternal serta sumber daya yg mencukupi	Adanya perubahan fokus kegiatan pada tahun berjalan yang menyesuaikan dengan kebijakan refocusing sehingga berimbang pada ketepatan realisasi anggaran	Menyesuaikan kembali timeline rencana kegiatan	Menyesuaikan target kinerja dengan sumber daya /anggaran								
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tribulan 1	Kecepatan dan ketepatan dalam mengajukan realisasi belanja	- Pelaksanaan kegiatan rapat penyusunan P-Renja 2025 menunggu instruksi dari Bappeda - Kompensasi gaji sisa masa jabatan kdh/wkdh belum terealisasi karena menunggu teknis pencairan	- Berkoordinasi dengan Bappeda menunggu P-RKPD 2025 ditetapkan - Koordinasi dengan BPKAD terkait teknis pencairan	melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan kegiatan sub kegiatan perangkat daerah pendukung visi misi Kepala Daerah yang belum tercukupi dalam apbd agar diusulkan ke dalam papbd								
		Tribulan 2	Kecepatan dan ketepatan dalam mengajukan realisasi belanja	-Adanya ASN yang mutasi dapat mengurangi realisasi kinerja/anggaran -Adanya perubahan jadwal pengadaan karena pergantian Kepala Daerah	- Berkoordinasi dengan instansi terkait update pegawai mutasi masuk dan keluar - Melaksanakan pergeseran anggaran kas	melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan visi misi Kepala Daerah								
		Tribulan 3	Didukung SDM dan sarana prasarana yang memadai dan koordinasi yang baik antar Bagian di Lingkup Setda	Realisasi menyesuaikan pengajuan	Melaksanakan pergeseran anggaran	melakukan inventarisasi pencapaian program kegiatan yang mendukung program program prioritas pemerintah pusat, provinsi dan daerah								
		Tribulan 4	Didukung SDM dan sarana prasarana yang memadai dan koordinasi yang baik antar Bagian di Lingkup Setda	Keterbatasan pilihan produk pada saat proses pengadaan dikarenakan masih banyak pelaku UMKM yang belum terdaftar dalam katalog Kabupaten Mojokerto	perlu menyusun timeline yang lebih terencana dan disiplin waktu serta mencegah penumpukan kegiatan pada akhir tahun	Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja terutama capaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran tahun anggaran 2025								
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tribulan 1	Adanya Sumberdaya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagian protokol dan komunikasi pimpinan, adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ketersediaan sumberdana dalam mendukung pelaksanaan tugas	1. Keterbatasan Tenaga Tenis 2. Kurang Optimalnya Fungsi Sarana dan Prasarana 3. Tiap pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan job description	Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana dengan mengusulkan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan.	mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana dengan melakukan perbaikan serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait .								
		Tribulan 2	Adanya Sumberdaya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagian protokol dan komunikasi pimpinan, adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ketersediaan sumberdana dalam mendukung pelaksanaan tugas	1. Keterbatasan Tenaga Tenis 2. Kurang Optimalnya Fungsi Sarana dan Prasarana 3. Tiap pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan job description	Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana dengan mengusulkan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan.	mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana dengan melakukan perbaikan serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait .								

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		Tribulan 3	Adanya Sumberdaya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagian protokol dan komunikasi pimpinan, adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ketersediaan sumberdana dalam mendukung pelaksanaan tugas	Dampak perubahan aturan terkait perjalanan Dinas Dalam Kota, efisiensi dan sisa selisih harga pengadaan barang/jasa, belum melakukan penyerapan Pengadaan belanja barang jasa.	Akan dilakukan pengadaan barang dan jasa di bulan berikutnya, akan menyesuaikan anggaran perjalanan dinas sesuai dengan juknis jaldis	mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana dengan melakukan perbaikan serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait									
		Tribulan 4	Adanya Sumberdaya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagian protokol dan komunikasi pimpinan, adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ketersediaan sumberdana dalam mendukung pelaksanaan tugas	Dampak perubahan aturan terkait perjalanan Dinas Dalam Kota, efisiensi dan sisa selisih harga pengadaan barang/jasa, belum melakukan penyerapan Pengadaan belanja barang jasa.	Akan dilakukan pengadaan barang dan jasa di bulan berikutnya, akan menyesuaikan anggaran perjalanan dinas sesuai dengan juknis jaldis	mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana dengan melakukan perbaikan serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait									

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tribulan (sesuai anggaran kas)		Realisasi Kinerja Pada Tribulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	
III		IV		I		II		III		IV							
10		11		12		13		14		15		16		22		23	
K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
	9,542,100,750.00		20,145,227,900.00	0.00	176838000	0.00	19720661675	0.00	16969449045	0	12015518055	3	48.882.466.775,00		161,337,633,297.00		185.79
	9,542,100,750.00		20145227900	0.00	176838000	0.00	19720661675	0.00	16969449045	0.00	12015518055	100	48.882.466.775,00		161,337,633,297.00		290.27
2.00	382,572,750.00	1.00	282164400	1	86.673.000	0	324124175	2	442260395	2,00	410.534.555,00	5,00	1.263.592.125,00				
1.00	9,118,655,300.00	3.00	19795851600	hukum	78.785.000	1	19353180000	2	16476974750	2,00	11.494.594.700,00	#VALUE!	47.403.534.450,00				
0.00	40,872,700.00	2.00	67211900	0	11.380.000	0	43357500	1	50213900	1,00	110.388.800,00	2,00	215.340.200,00				
25.00	0,00	25,00	2.844.872.500,00	30,00	314.102.641.00	0,00	290.252.300,00	0,00	337.886.620,00	0	1577842807	30,00	2.520.084.368,00				
	0,00		1.010.115.000,00	9,00	96885000	0,00	100516850	0,00	125419500	0,00	642831074	9,00	965.652.424,00		5,870,795,218.00		68.27
0,00	0,00	1,00	140.400.000,00	0,00	2.725.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	4.869.000,00	1,00	60.009.820,00	1,00	70.543.820,00		3,292,430,828.00		53.24
8,00	0,00	6,00	438.448.500,00	7,00	35.051.000,00	6,00	43.059.000,00	8,00	47.571.500,00	5,00	272.989.000,00	26,00	398.670.500,00				
3,00	0,00	3,00	431.266.500,00	3,00	59.109.000,00	3,00	54.517.850,00	4,00	69.479.000,00	2,00	309.832.254,00	12,00	492.938.104,00				
	0,00		1.834.757.500,00	15,00	217217641	0,00	189735450	0,00	212467120	0,00	935011733	15,00	1.554.431.944,00				
20,00	0,00	15,00	1.834.757.500,00	15,00	217.217.641,00	15,00	189.735.450,00	17,00	210.147.220,00	13,00	937.331.633,00	60,00	1.554.431.944,00		2,578,364,390.00		75.84
20,00	0,00	15,00	1834757500	15,00	217217641	15,00	189735450	17,00	212467120	13,00	0.00	47,00	619,420,211.00				
	1,019,915,739.00		164,605,682.00	0.00	153,255,779.00	0.00	157296198	0.00	319155830	0	666347230	0.00	1.296.055.037,00		5,244,062,606.00		0.00
45.00	1,019,915,739.00	55.00	164,605,682.00	0.00	153255779	0.00	157296198	0	319155830	0.00	666347230	167%	1.296.055.037,00		5,244,062,606.00		1,391.00
	257,874,365.00		6,018,000.00	251	35710648	206	51274668	324	86388690	361	204446386	1.142,00	377.820.392,00				
	115,740,624.00		131,216,982.00	4	47839207	17	72931692	19	135193312	17	112990160	57,00	368.954.371,00				
0.00	646,300,750.00	0.00	27,370,700.00	264	69705924	249	33089838	381	97573828	467	348910684	1.361,00	549.280.274,00				
	151,167,900.00		256,713,150.00	4.00	83,503,500.00	0.00	84,681,500.00	0.00	90,278,089.00	0	0	4.00	258,463,089.00		2,380,668,812.00		31.74
	91,027,100.00		185,503,950.00	0.00	62416000	0.00	76103500	0.00	75448479	0.00	0	3,71	213.967.979,00		2,089,980,124.00		69.67
	61,927,100.00		121,331,150.00	0	14.807.000,00	-	42.838.500,00	-	38.214.400,00	2	156.266.898,00	2,00	252.126.798,00				

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	25,470,000.00		59,332,800.00	0	37,083,000.00	-	28,316,000.00	-	32,929,079.00	1	51,893,300.00	1,00	150,221,379.00				
	3,630,000.00		4,840,000.00	0	10,526,000.00	-	4,949,000.00	-	4,305,000.00	1	7,401,750.00	1,00	27,181,750.00				
	60,140,800.00		71,209,200.00	0.00	21,087,500.00	0.00	8,578,000.00	0.00	14,829,610.00	0.00	97,383,001.00	100,00	141,878,111.00		290,688,688.00		6.46
	54,890,800.00		64,209,200.00	0	10,675,000.00	-	2,284,000.00	-	8,923,500.00	1	88,411,001.00	1,00	110,293,501.00				
	5,250,000.00		7,000,000.00	0	10412500	0	6294000	0	5906110	1,2	8972000	1,20	31,584,610.00				
25.00	174,547,050.00	25.00	525,368,608.00	16.39	50,306,100.00	0.00	128,459,957.00	0.00	148,290,157.00	0	0	100	327,056,214.00		2,813,945,810.00		45.72
25.00	174,547,050.00	25.00	525,368,608.00	16.39	50306100	0.00	128459957	0.00	148290157	0.00	0	100	906,158,466.00		2,813,945,810.00		45.72
0.00	25,037,500.00	1	58,066,901.00	0	10295000	0	15505000	0	32886369	1,00	74,737,560.00	1,00	133,423,929.00				
0.00	111,971,050.00	3	430,578,745.00	0	29527100	0	91684329	0	82576208	3,00	452,041,112.00	3,00	655,828,749.00				
3.00	37,538,500.00	3	36,722,962.00	3	10484000	3	21270628	3	32827580	3,00	52,323,580.00	12,00	116,905,788.00				
	84,392,600.00		97,441,400.00	0.00	47,114,540.00	0.00	66,154,000.00	0.00	97,795,462.00	0	0	3	211,064,002.00		2,028,880,161.00		69.84
	84,392,600.00		97,441,400.00	0.00	47114540	0.00	66154000	0.00	97795462	0.00	114908034	100	325972036		2,028,880,161.00		69.84
	36,290,500.00		28,025,500.00	2	9705100	14	26021000	2	52735462	2	31768234	20	120229796				
	21,539,600.00		29,066,600.00	0	20459440	1	18725000	1	21377000	1	32270800	3	92832240				
	26,562,500.00		40,349,300.00	100	16950000	134	21408000	66	23683000	50	50869000	350	112910000				
	4,904,324,518.00		7,165,618,732.00	0,00	3,675,325,091.00	0,00	3,084,736,798.00	0,00	3,859,918,386.00	0	8015008342	0,00	18,634,988,617.00		81,420,607,269.00		0,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	0,00		0,00	0,00	1500000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.500.000,00		147.855.120,00		98,57
30,00	0,00	10,00	0,00	30,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.500.000,00				
	2.266.055.433,00		3.249.116.008,00	0,00	1367666000	0,00	1718879640	0,00	1824907050	0,00	3635369680	0,00	8.546.822.370,00		36.006.978.407,00		179,32
1,00	21.000.000,00	1,00	111.240.000,00	1,00	129.165.000,00	0,00	12.250.000,00	1,00	7.000.000,00	1,00	75.493.190,00	3,00	223.908.190,00				
2,00	406.011.608,00	2,00	1.152.794.950,00	1,00	672.585.000,00	2,00	313.923.940,00	1,00	136.445.999,00	3,00	1.315.725.703,00	7,00	2.438.680.642,00				
4,00	176.042.125,00	4,00	587.225.908,00	1,00	85.131.000,00	3,00	209.396.550,00	2,00	213.697.501,00	8,00	540.400.437,00	14,00	1.048.625.488,00				
3,00	110.000.000,00	3,00	76.460.750,00	3,00	62.681.000,00	3,00	63.722.000,00	3,00	105.175.000,00	3,00	179.182.000,00	12,00	410.760.000,00				
3,00	1.553.001.700,00	3,00	1.321.394.400,00	3,00	418.104.000,00	3,00	1.119.587.150,00	3,00	1.362.588.550,00	3,00	1.524.568.350,00	12,00	4.424.848.050,00				
	189.375,00		1.929.421.300,00	0,00	1297400000	0,00	0	0,00	0	0,00	1649030000	0,00	2.946.430.000,00		10.884.969.860,00		725,66
	189.375,00	0,00	1.929.421.300,00	2,00	1.297.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.649.030.000,00	6,00	2.946.430.000,00				
	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2.092.121.110,00		1.422.796.924,00	0,00	575032538	0,00	821289033	0,00	1429059308	0,00	2334837679	0,00	5.160.218.558,00		24.900.500.545,00		133,91
2,00	235.460.000,00	1,00	330.782.000,00	2,00	151.918.626,00	2,00	150.876.300,00	0,00	262.764.033,00	3,00	267.754.865,00	7,00	833.313.824,00				
8,00	435.854.000,00	8,00	540.075.100,00	8,00	275.087.580,00	10,00	295.533.150,00	11,00	431.920.265,00	3,00	528.213.094,00	32,00	1.530.754.089,00				
62,00	86.105.090,00	62,00	6.308.160,00	32,00	19.740.000,00	31,00	18.470.000,00	57,00	42.270.000,00	130,00	49.710.000,00	250,00	130.190.000,00				
1,00	830.164.400,00	1,00	235.699.200,00	0,00	119.210.332,00	1,00	210.109.758,00	0,00	553.660.260,00	2,00	679.484.365,00	3,00	1.562.464.715,00				
1,00	450.767.520,00	0,00	102.649.364,00	0,00	9.076.000,00	0,00	146.299.825,00	1,00	33.688.500,00	1,00	477.694.307,00	2,00	666.758.632,00				
1,00	53.770.100,00	0,00	207.283.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	104.756.250,00	1,00	331.981.048,00	2,00	436.737.298,00				
	0,00		62.941.500,00	0,00	3673178	0,00	23140450	0,00	51648103	0,00	43067292	0,00	121.529.023,00		505.081.415,00		72,15
2,00	0,00	2,00	62.941.500,00	1,00	3.673.178,00	2,00	23.140.450,00	5,00	51.648.103,00	0,00	43.067.292,00	8,00	121.529.023,00				
	545.958.600,00		501.343.000,00	0,00	430053375	0,00	521427675	0,00	554303925	0,00	352703691	0,00	1.858.488.666,00		8.975.221.922,00		158,85
3,00	250.780.100,00	3,00	209.467.900,00	3,00	177.590.325,00	3,00	236.786.900,00	3,00	248.162.425,00	3,00	152.461.080,00	12,00	815.000.730,00				
3,00	168.809.400,00	3,00	161.309.400,00	3,00	156.115.050,00	3,00	187.325.475,00	3,00	172.183.075,00	3,00	107.652.768,00	12,00	623.276.368,00				
3,00	126.369.100,00	3,00	130.565.700,00	3,00	96.348.000,00	3,00	97.315.300,00	3,00	133.958.425,00	3,00	92.589.843,00	12,00	420.211.568,00				
	250.282.915,00		257.667.655,00	0,00	90.210.660,00	0,00	139.354.747,00	0,00	196.997.453,00	0	0	100	426.562.860,00		2.997.834.261,00		41,75
	250.282.915,00		257.667.655,00	0,00	90.210.660,00	0,00	139.354.747,00	0,00	196.997.453,00	0,00	11.341.075,00	48	437.903.935,00		2.997.834.261,00		0,00
	18.666.500,00		11.600.450,00	-	13.850.960,00	-	11.354.960,00	1,00	16.308.960,00	1,00	11.341.075,00	2,00	52.855.955,00				

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			0		0.00		0.00		0								
	250,282,915.00		257,667,655.00	0.00	90210660	0.00	139354747	0.00	196997453	0.00	0	48	426,562,860.00		2,997,834,261.00		0.00
	169,822,415.00		165,026,900.00	2	30649300	1	96387947	2	122653593	1,00	149.858.237,00	6,00	399.549.077,00				
	875,000.00		5,362,800.00	3	24838000	0	1372800	0	6484000	1,00	15.255.120,00	4,00	47.949.920,00				
	250,282,915.00		257,667,655.00	0.00	90,210,660.00	0.00	139,354,747.00	0.00	196,997,453.00	0	0	93,85	426,562,860.00		2,997,834,261.00		41.75
	250,282,915.00		257,667,655.00	0.00	90210660	0.00	139354747	0.00	196997453	0.00	0	57	426,562,860.00		2,997,834,261.00		0.00
	27,652,100.00		20,711,035.00	0	6235400	1	15558145	1	21492800	1	41725950	3,00	85.012.295,00				
	33,266,900.00		54,966,470.00	1	14637000	1	14680895	1	30058100	1	33265138	4,00	92.641.133,00				
	5,632,102,716.00		6,594,507,546.00	0.00	6,012,226,682.00	0.00	7,396,548,417.00	0.00	6,380,747,665.00	0	0	94,6	19,789,522,764.00		111,138,460,837.00		0.00
	9,279,900.00		34,290,100.00	0.00	3274497	0.00	1200000	0.00	8124750	100,00	38242650	100,00	50.841.897,00		182.287.435,00		264,18
	6,379,900.00		17,800,100.00	4,00	2.002.500,00	3,00	0,00	3,00	4.862.250,00	2,00	20.508.850,00	12,00	27.373.600,00				
	2,900,000.00		16,490,000.00	4,00	1.271.997,00	3,00	1.200.000,00	4,00	3.262.500,00	5,00	17.733.800,00	16,00	23.468.297,00				
	4,875,689,809.00		4,562,105,777.00	0.00	5231334751	0.00	6285600102	0.00	4950110634	100,00	6017537262	100,00	22.484.582.749,00		104.266.929.635,00		131,84
	4,845,929,459.00		4,504,942,127.00	522,00	5.230.934.751,00	443,00	6.283.084.102,00	598,00	4.949.710.634,00	451,00	5.937.027.662,00	2.014,00	22.400.757.149,00				
	29,760,350.00		57,163,650.00	22,00	400.000,00	25,00	2.516.000,00	28,00	400.000,00	21,00	80.509.600,00	96,00	83.825.600,00				
	0.00		0.00	0.00	1040000	0.00	134745000	0.00	0	100,00	0	100,00	135.785.000,00		869.674.877,00		102,19
	0.00		0.00	0.00	1.040.000,00	2,00	134.745.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	2,00	135.785.000,00				
	281,847,752.00		881,135,283.00	0.00	202752651	0.00	350054745	0.00	718556629	100,00	688254431	100,00	1.959.618.456,00		8.643.757.187,00		151,41
	78,000,000.00		190,685,197.00	0.00	10.436.000,00	0.00	0,00	1,00	30.456.850,00	2,00	243.145.500,00	3,00	284.038.350,00				
	9,492,600.00		10,959,400.00	24,00	4.800.000,00	31,00	7.620.000,00	90,00	11.480.000,00	0,00	13.785.000,00	145,00	37.685.000,00				
	8,298,000.00		7,350,600.00	0.00	100.000,00	0.00	570.000,00	1,00	165.284.991,00	0.00	13.667.500,00	1,00	179.622.491,00				
	186,057,152.00		672,140,086.00	3,00	187.416.651,00	3,00	341.864.745,00	3,00	511.334.788,00	3,00	417.656.431,00	12,00	1.458.272.615,00				
	107,235,898.00		131,401,198.00	0.00	65084734	0.00	82551859	0.00	110285839	100,00	132391076	100,00	390.313.508,00		1.940.986.342,00		116,44
	44,276,898.00		47,273,298.00	3,00	33.584.734,00	3,00	27.751.859,00	3,00	52.428.339,00	3,00	49.371.076,00	12,00	163.136.008,00				
	62,959,000.00		84,127,900.00	2,00	31.500.000,00	3,00	54.800.000,00	3,00	57.857.500,00	4,00	83.020.000,00	12,00	227.177.500,00				

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	358.049.357,00		985.575.188,00	0,00	508740049	0,00	542396711	0,00	593669813	100,00	919960896	100,00	2.564.767.469,00		10.827.597.991,00		281,93
	102.582.657,00		344.975.188,00	8,00	212.942.580,00	8,00	310.000.161,00	8,00	216.397.832,00	6,00	255.328.190,00	30,00	994.668.763,00				
	63.516.700,00		85.450.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	1,00	95.182.500,00	2,00	146.561.600,00	3,00	259.144.100,00				
	191.950.000,00		555.150.000,00	79,00	295.797.469,00	58,00	214.996.550,00	94,00	282.089.481,00	133,00	518.071.106,00	364,00	1.310.954.606,00				
	503,616,695.00		623939084	0.00	205278500	0.00	426568738	0.00	471681584	91.87	624929738	91.87	1728458560		6,763,133,911.00		79.59
25.00	503,616,695.00	25.00	623939084	26.00	205278500	37.00	426568738	0.00	471681584	32.68	624929738	90,38	1.728.458.560,00		6,763,133,911.00		0.00
75.00	169,790,000.00	75.00	176004219	77	83541500	78	151733839	120	194796620	172,00	192.306.482,00	447,00	622.378.441,00				
165.00	210,966,175.00	164.00	321228185	156	85790000	262	183617879	249	183808498	282,00	300.278.750,00	949,00	753.495.127,00				
63.00	122,860,520.00	63.00	126706680	80	35947000	112	91217020	124	93076466	134,00	132.344.506,00	450,00	352.584.992,00				

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Total Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan Tribulan								Total Realisasi dan Anggaran sampai dengan Tribulan								Kuantitas
	I		II		III		IV		I		II		III		IV		
	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
24	22		23		24		25		26		27		28		29		
Setda (bagian Kesejahteraan Rakyat)																	
Setda (bagian Kesejahteraan Rakyat)	0	12342414650	0	22419013900	0	31961114650	0	52106342550	0	187338000	0	20007999675	0	36866948690	0	48592466745	0
Setda (bagian Kesejahteraan Rakyat)		12342414650	0	22419013900	0	31961114650	0	52106342550	0	187338000	0	20007999675	0	36866948690	0	48592466745	0
Setda (bagian Kesejahteraan Rakyat)	1	178985650	2	731259500	4	1113832250	5	1395996650	1	86673000	1	410797175	3	853057540	5	1263592095	100
Setda (bagian Kesejahteraan Rakyat)	0	12089301400	1	21554704000	2	30673359300	5	50469210900	0	89285000	1	19542465000	3	35908939750	5	47113534450	0
Setda (bagian Kesejahteraan Rakyat)	0	74127600	0	133050400	0	173923100	2	241135000	0	11380000	0	54737500	1	104951400	2	215340200	0
Setda (bagian Pemerintahan)																	
Setda (bagian Pemerintahan)	25	100000000	50	100000000	75	100000000	100	2944872500	30	314102641	30	604354941	30	942241561	30	2520084368	120
Setda (bagian Pemerintahan)		100000000	0	100000000	0	100000000	0	1110115000	9	314102641	9	604354941	9	942241561	9	2520084368	0
Setda (bagian Pemerintahan)	0	0	0	0	0	0	1	140400000	0	2725000	0	5665000	0	14034000	1	74043820	0
Setda (bagian Pemerintahan)	6	0	12	0	20	0	26	438448500	7	35051000	13	78110000	21	125681500	26	398670500	116,6666667
Setda (bagian Pemerintahan)	3	100000000	6	100000000	9	100000000	12	531266500	3	59109000	6	113626850	10	183105850	12	492938104	100
Setda (bagian Pemerintahan)		0	0	0	0	0	0	1834757500	15	314102641	15	604354941	15	942241561	15	2520084368	0
Setda (bagian Pemerintahan)	10	0	25	0	45	0	60	1834757500	15	217217641	30	406953091	47	619420211	60	1554431944	150
Setda (bagian Hukum)	0.00	213,904,710.00	0.00	550,935,459.00	0.00	1,570,851,198.00	0.00	1,735,456,880.00	0.00	153,255,779.00	0.00	310,551,977.00	0.00	629,707,807.00	0.00	629,707,807.00	0.00
Setda (bagian Hukum)	20.00	213,904,710.00	50.00	550,935,459.00	95.00	1,570,851,198.00	150.00	1,735,456,880.00	0.00	153,255,779.00	0.00	310,551,977.00	65.00	629,707,807.00	65.00	629,707,807.00	0.00
Setda (bagian Hukum)		39,369,105.00	0.00	137,303,385.00	0.00	395,177,750.00	0.00	401,195,750.00	251	35,710,648.00	457	86,985,316.00	781	173,374,006.00	1142	377,820,392.00	0.00
Setda (bagian Hukum)		61,229,205.00	0.00	217,957,074.00	0.00	333,697,698.00	0.00	464,914,680.00	4	47,839,207.00	21	120,770,899.00	40	255,964,211.00	57	368,954,371.00	0.00
Setda (bagian Hukum)	0.00	113,306,400.00	0.00	195,675,000.00	0.00	841,975,750.00	0.00	869,346,450.00	264	69,705,924.00	513	102,795,762.00	894	200,369,590.00	1361	549,280,274.00	0.00
Setda (bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)																	
Setda (bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)	-	85.630.200,00	-	236.509.500,00	-	387.677.400,00	-	644.390.550,00	4,00	83.503.500,00	4,00	168.185.000,00	4,00	258.463.089,00	4,00	571.408.038,00	-
Setda (bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)		56.200.900,00	-	160.642.400,00	-	251.669.500,00	-	437.173.450,00	-	83.503.500,00	-	168.185.000,00	-	258.463.089,00	-	571.408.038,00	-
Setda (bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)		14.982.000,00	-	70.468.300,00	-	132.395.400,00	-	253.726.550,00	-	14.807.000,00	-	57.645.500,00	-	95.859.900,00	2,00	252.126.798,00	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Setda (bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)		28.320.000,00	-	71.045.200,00	-	96.515.200,00	-	155.848.000,00	-	37.083.000,00	-	65.399.000,00	-	98.328.079,00	1,00	150.221.379,00	-
Setda (bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)		12.898.900,00	-	19.128.900,00	-	22.758.900,00	-	27.598.900,00	-	10.526.000,00	-	15.475.000,00	-	19.780.000,00	1,00	27.181.750,00	-
Setda (bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)		29.429.300,00	-	75.867.100,00	-	136.007.900,00	-	207.217.100,00	-	83.503.500,00	-	168.185.000,00	-	258.463.089,00	-	571.408.038,00	-
Setda (bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)		16.500.000,00	-	55.900.000,00	-	110.790.800,00	-	175.000.000,00	-	10.675.000,00	-	12.959.000,00	-	21.882.500,00	1,00	110.293.501,00	-
Setda (bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam)		12.929.300,00	-	19.967.100,00	-	25.217.100,00	-	32.217.100,00	-	10.412.500,00	-	16.706.500,00	0,20	22.612.610,00	1,40	31.584.610,00	-
Setda (bagian Administrasi Pembangunan)																	
Setda (bagian Administrasi Pembangunan)	25,00	79.479.600,00	50,00	279.624.304,00	75,00	454.171.354,00	100,00	979.539.962,00	16,39	50.306.100,00	16,39	178.766.057,00	16,39	327.056.214,00	16,39	327.056.214,00	65,56
Setda (bagian Administrasi Pembangunan)	25,00	79.479.600,00	50,00	279.624.304,00	75,00	454.171.354,00	100,00	979.539.962,00	16,39	50.306.100,00	16,39	178.766.057,00	16,39	327.056.214,00	16,39	327.056.214,00	65,56
Setda (bagian Administrasi Pembangunan)	0,00	15.552.500,00	0,00	59.341.599,00	0,00	84.379.099,00	1,00	142.446.000,00	0,00	10.295.000,00	0,00	25.800.000,00	0,00	58.686.369,00	0,00	58.686.369,00	0,00
Setda (bagian Administrasi Pembangunan)	0,00	56.966.700,00	0,00	173.522.005,00	0,00	285.493.055,00	3,00	716.071.800,00	0,00	29.527.100,00	0,00	121.211.429,00	0,00	203.787.637,00	0,00	203.787.637,00	0,00
Setda (bagian Administrasi Pembangunan)	3,00	6.960.400,00	6,00	46.760.700,00	9,00	84.299.200,00	12,00	121.022.162,00	3,00	10.484.000,00	6,00	31.754.628,00	9,00	64.582.208,00	9,00	64.582.208,00	100,00
Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)																	
Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)	25	79.479.600	50	279.624.304	75	454.171.354	100	979.539.962	16	50.306.100	16	178.766.057	16	327.056.214	16	906.158.466	65,56
Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)	25	79.479.600	50	279.624.304	75	454.171.354	100	979.539.962	16	50.306.100	16	178.766.057	16	327.056.214	16	906.158.466	65,56
Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)	0	15.552.500	0	59.341.599	0	84.379.099	1	142.446.000	0	10.295.000	0	25.800.000	0	58.686.369	1	133.423.929	0,00
Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)	0	56.966.700	0	173.522.005	0	285.493.055	3	716.071.800	0	29.527.100	0	121.211.429	0	203.787.637	3	655.828.749	0,00
Setda (bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)	3	6.960.400	6	46.760.700	9	84.299.200	12	121.022.162	3	10.484.000	6	31.754.628	9	64.582.208	12	116.905.788	100,00
Setda (bagian Umum)																	
Setda (bagian Umum)	0,00	3.638.836.945,00	0,00	8.832.912.550,00	0,00	13.737.237.068,00	0,00	20.902.855.800,00	0,00	3.675.325.091,00	0,00	6.760.061.889,00	0,00	10.619.980.275,00	0,00	18.634.988.617,00	0,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Setda (bagian Umum)		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	3.675.325.091,00	0,00	6.760.061.889,00	0,00	10.619.980.275,00	0,00	18.634.988.617,00	0,00
Setda (bagian Umum)	30,00	1.500.000,00	60,00	1.500.000,00	90,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	30,00	1.500.000,00	30,00	1.500.000,00	30,00	1.500.000,00	30,00	1.500.000,00	100,00
Setda (bagian Umum)		1.000.641.000,00	0,00	4.016.062.320,00	0,00	6.282.117.753,00	0,00	9.531.233.761,00	0,00	3.675.325.091,00	0,00	6.760.061.889,00	0,00	10.619.980.275,00	0,00	18.634.988.617,00	0,00
Setda (bagian Umum)	0,00	150.000.000,00	1,00	171.000.000,00	2,00	192.000.000,00	3,00	303.240.000,00	1,00	129.165.000,00	1,00	141.415.000,00	2,00	148.415.000,00	3,00	223.908.190,00	0,00
Setda (bagian Umum)	1,00	153.635.000,00	3,00	1.109.330.170,00	5,00	1.515.341.778,00	7,00	2.668.136.728,00	1,00	672.585.000,00	3,00	986.508.940,00	4,00	1.122.954.939,00	7,00	2.438.680.642,00	100,00
Setda (bagian Umum)	2,00	98.783.500,00	6,00	425.260.800,00	10,00	601.302.925,00	14,00	1.188.528.833,00	1,00	85.131.000,00	4,00	294.527.550,00	6,00	508.225.051,00	14,00	1.048.625.488,00	50,00
Setda (bagian Umum)	3,00	75.360.000,00	6,00	225.360.000,00	9,00	335.360.000,00	12,00	411.820.750,00	3,00	62.681.000,00	6,00	126.403.000,00	9,00	231.578.000,00	12,00	410.760.000,00	100,00
Setda (bagian Umum)	3,00	522.862.500,00	6,00	2.085.111.350,00	9,00	3.638.113.050,00	12,00	4.959.507.450,00	3,00	418.104.000,00	6,00	1.537.691.150,00	9,00	2.900.279.700,00	12,00	4.424.848.050,00	100,00
Setda (bagian Umum)		1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	1.300.189.375,00	0,00	3.229.610.675,00	0,00	3.675.325.091,00	0,00	6.760.061.889,00	0,00	10.619.980.275,00	0,00	18.634.988.617,00	0,00
Setda (bagian Umum)	2,00	1.300.000.000,00	5,00	1.300.000.000,00	5,00	1.300.189.375,00	5,00	3.229.610.675,00	2,00	1.297.400.000,00	2,00	1.297.400.000,00	2,00	1.297.400.000,00	6,00	2.946.430.000,00	100,00
Setda (bagian Umum)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.325.091,00	0,00	6.760.061.889,00	0,00	10.619.980.275,00	0,00	18.634.988.617,00	0,00
Setda (bagian Umum)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setda (bagian Umum)		798.042.445,00	0,00	2.378.593.330,00	0,00	4.470.714.440,00	0,00	5.893.511.364,00	0,00	3.675.325.091,00	0,00	6.760.061.889,00	0,00	10.619.980.275,00	0,00	18.634.988.617,00	0,00
Setda (bagian Umum)	2,00	167.718.000,00	4,00	329.958.000,00	6,00	565.418.000,00	7,00	896.200.000,00	2,00	151.918.626,00	4,00	302.794.926,00	4,00	565.558.959,00	7,00	833.313.824,00	100,00
Setda (bagian Umum)	8,00	347.567.900,00	16,00	683.420.900,00	24,00	1.119.274.900,00	32,00	1.659.350.000,00	8,00	275.087.580,00	18,00	570.620.730,00	29,00	1.002.540.995,00	32,00	1.530.754.089,00	100,00
Setda (bagian Umum)	64,00	24.574.375,00	126,00	76.088.750,00	188,00	162.193.840,00	250,00	168.502.000,00	32,00	19.740.000,00	63,00	38.210.000,00	120,00	80.480.000,00	250,00	130.190.000,00	50,00
Setda (bagian Umum)	0,00	202.876.350,00	1,00	870.586.400,00	2,00	1.700.750.800,00	3,00	1.936.450.000,00	0,00	119.210.332,00	1,00	329.320.090,00	1,00	882.980.350,00	3,00	1.562.464.715,00	0,00
Setda (bagian Umum)	0,00	39.298.580,00	1,00	200.232.480,00	2,00	651.000.000,00	2,00	753.649.364,00	0,00	9.076.000,00	0,00	155.375.825,00	1,00	189.064.325,00	2,00	666.758.632,00	0,00
Setda (bagian Umum)	0,00	16.007.240,00	1,00	218.306.800,00	2,00	272.076.900,00	2,00	479.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	104.756.250,00	2,00	436.737.298,00	0,00
Setda (bagian Umum)		20.000.000,00	0,00	62.058.500,00	0,00	62.058.500,00	0,00	125.000.000,00	0,00	3.675.325.091,00	0,00	6.760.061.889,00	0,00	10.619.980.275,00	0,00	18.634.988.617,00	0,00
Setda (bagian Umum)	2,00	20.000.000,00	4,00	62.058.500,00	6,00	62.058.500,00	8,00	125.000.000,00	1,00	3.673.178,00	3,00	26.813.628,00	8,00	78.461.731,00	8,00	121.529.023,00	50,00
Setda (bagian Umum)		518.653.500,00	0,00	1.074.698.400,00	0,00	1.620.657.000,00	0,00	2.122.000.000,00	0,00	3.675.325.091,00	0,00	6.760.061.889,00	0,00	10.619.980.275,00	0,00	18.634.988.617,00	0,00
Setda (bagian Umum)	3,00	229.046.300,00	6,00	489.752.000,00	9,00	740.532.100,00	12,00	950.000.000,00	3,00	177.590.325,00	6,00	414.377.225,00	9,00	662.539.650,00	12,00	815.000.730,00	100,00
Setda (bagian Umum)	3,00	173.291.900,00	6,00	369.881.200,00	9,00	538.690.600,00	12,00	700.000.000,00	3,00	156.115.050,00	6,00	343.440.525,00	9,00	515.623.600,00	12,00	623.276.368,00	100,00
Setda (bagian Umum)	3,00	116.315.300,00	6,00	215.065.200,00	9,00	341.434.300,00	12,00	472.000.000,00	3,00	96.348.000,00	6,00	193.663.300,00	9,00	327.621.725,00	12,00	420.211.568,00	100,00
	7.86	7.202.313.890,00	15.94	17.440.465.100,00	24.06	27.139.114.136,00	31.57	41.393.890.850,00	4.37	7.287.969.182,00	13.94	13.393.720.778,00	19.51	21.008.382.550,00	24.06	21.008.382.550,00	50.38
Setda (bagian Organisasi)	-	105.809.850,00	-	288.907.600,00	-	539.190.515,00	-	796.858.170,00	-	90.210.660,00	-	229.565.407,00	-	426.562.860,00	100,00	683.074.125,00	-
Setda (bagian Organisasi)		105.809.850,00	-	288.907.600,00	-	539.190.515,00	-	796.858.170,00	-	90.210.660,00	-	229.565.407,00	-	426.562.860,00	48,00	683.074.125,00	-
Setda (bagian Organisasi)		12.809.150,00	-	51.106.550,00	-	69.773.050,00	-	81.373.500,00	-	13.850.960,00	-	25.205.920,00	1,00	41.514.880,00	2,00	57.921.700,00	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Setda (bagian Organisasi)		105.809.850,00	-	288.907.600,00	-	539.190.515,00	-	796.858.170,00	-	90.210.660,00	-	229.565.407,00	-	426.562.860,00	48,00	683.074.125,00	-
Setda (bagian Organisasi)		23.638.000,00	-	102.875.250,00	-	272.697.665,00	-	437.724.565,00	2,00	30.649.300,00	3,00	127.037.247,00	5,00	249.690.840,00	6,00	399.549.077,00	-
Setda (bagian Organisasi)		38.864.400,00	-	43.762.200,00	-	44.637.200,00	-	50.000.000,00	3,00	24.838.000,00	3,00	26.210.800,00	3,00	32.694.800,00	4,00	47.949.920,00	-
Setda (bagian Organisasi)																	
Setda (bagian Organisasi)		105.809.850,00	-	288.907.600,00	-	539.190.515,00	-	796.858.170,00	-	90.210.660,00	-	229.565.407,00	-	426.562.860,00	93,85	683.074.125,00	-
Setda (bagian Organisasi)		105.809.850,00	-	288.907.600,00	-	539.190.515,00	-	796.858.170,00	-	90.210.660,00	-	229.565.407,00	-	426.562.860,00	57,00	683.074.125,00	-
Setda (bagian Organisasi)		15.927.900,00	-	52.250.300,00	-	79.902.400,00	-	100.613.435,00	-	6.235.400,00	1,00	21.793.545,00	2,00	43.286.345,00	3,00	85.012.295,00	-
Setda (bagian Organisasi)		14.570.400,00	-	38.913.300,00	-	72.180.200,00	-	127.146.670,00	1,00	14.637.000,00	2,00	29.317.895,00	3,00	59.375.995,00	4,00	92.641.133,00	-
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)																	
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)	0,00	7.120.986.563,00	0,00	16.261.832.375,00	0,00	21.893.935.091,00	0,00	28.488.442.637,00	0,00	6.012.226.682,00	0,00	13.408.775.099,00	0,00	19.789.522.764,00	0,00	19.789.522.764,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		5.780.000,00	0,00	9.380.000,00	0,00	18.659.900,00	0,00	52.950.000,00	0,00	6.012.226.682,00	0,00	13.408.775.099,00	0,00	19.789.522.764,00	100,00	27.585.909.079,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	10.679.900,00	0,00	28.480.000,00	4,00	2.002.500,00	7,00	2.002.500,00	10,00	6.864.750,00	12,00	27.373.600,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		1.480.000,00	0,00	5.080.000,00	0,00	7.980.000,00	0,00	24.470.000,00	4,00	1.271.997,00	7,00	2.471.997,00	11,00	5.734.497,00	16,00	23.468.297,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		5.966.045.307,00	0,00	13.667.925.414,00	0,00	18.543.615.223,00	0,00	23.105.721.000,00	0,00	6.012.226.682,00	0,00	13.408.775.099,00	0,00	19.789.522.764,00	100,00	27.585.909.079,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		5.966.045.307,00	0,00	13.664.849.414,00	0,00	18.510.778.873,00	0,00	23.015.721.000,00	522,00	5.230.934.751,00	965,00	11.514.018.853,00	1.563,00	16.463.729.487,00	2.014,00	22.400.757.149,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		0,00	0,00	3.076.000,00	0,00	32.836.350,00	0,00	90.000.000,00	22,00	400.000,00	47,00	2.916.000,00	75,00	3.316.000,00	96,00	83.825.600,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		1.850.000,00	0,00	164.270.500,00	0,00	164.270.500,00	0,00	164.270.500,00	0,00	6.012.226.682,00	0,00	13.408.775.099,00	0,00	19.789.522.764,00	100,00	27.585.909.079,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		1.850.000,00	0,00	164.270.500,00	0,00	164.270.500,00	0,00	164.270.500,00	0,00	1.040.000,00	2,00	135.785.000,00	2,00	135.785.000,00	2,00	135.785.000,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		395.584.788,00	0,00	872.215.662,00	0,00	1.154.063.414,00	0,00	2.035.198.697,00	0,00	6.012.226.682,00	0,00	13.408.775.099,00	0,00	19.789.522.764,00	100,00	27.585.909.079,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		12.225.000,00	0,00	49.026.300,00	0,00	127.026.300,00	0,00	317.711.497,00	0,00	10.436.000,00	0,00	10.436.000,00	1,00	40.892.850,00	3,00	284.038.350,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		9.492.600,00	0,00	19.985.200,00	0,00	29.477.800,00	0,00	40.437.200,00	24,00	4.800.000,00	55,00	12.420.000,00	145,00	23.900.000,00	145,00	37.685.000,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		1.000.000,00	0,00	171.401.400,00	0,00	179.699.400,00	0,00	187.050.000,00	0,00	100.000,00	0,00	670.000,00	1,00	165.954.991,00	1,00	179.622.491,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		372.867.188,00	0,00	631.802.762,00	0,00	817.859.914,00	0,00	1.490.000.000,00	3,00	187.416.651,00	6,00	529.281.396,00	9,00	1.040.616.184,00	12,00	1.458.272.615,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		83.186.906,00	0,00	190.843.804,00	0,00	298.079.702,00	0,00	429.480.900,00	0,00	6.012.226.682,00	0,00	13.408.775.099,00	0,00	19.789.522.764,00	100,00	27.585.909.079,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		41.356.906,00	0,00	85.633.804,00	0,00	129.910.702,00	0,00	177.184.000,00	3,00	33.584.734,00	6,00	61.336.593,00	9,00	113.764.932,00	12,00	163.136.008,00	0,00
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		41.830.000,00	0,00	105.210.000,00	0,00	168.169.000,00	0,00	252.296.900,00	2,00	31.500.000,00	5,00	86.300.000,00	8,00	144.157.500,00	12,00	227.177.500,00	0,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		668.539.562,00	0,00	1.357.196.995,00	0,00	1.715.246.352,00	0,00	2.700.821.540,00	0,00	6.012.226.682,00	0,00	13.408.775.099,00	0,00	19.789.522.764,00	100,00	27.585.909.079,00	0,00	
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		426.589.562,00	0,00	678.846.995,00	0,00	781.429.652,00	0,00	1.126.404.840,00	8,00	212.942.580,00	16,00	522.942.741,00	24,00	739.340.573,00	30,00	994.668.763,00	0,00	
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		0,00	0,00	114.450.000,00	0,00	177.966.700,00	0,00	263.416.700,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	1,00	112.582.500,00	3,00	259.144.100,00	0,00	
Setda (bagian Perencanaan Dan Keuangan)		241.950.000,00	0,00	563.900.000,00	0,00	755.850.000,00	0,00	1.311.000.000,00	79,00	295.797.469,00	137,00	510.794.019,00	231,00	792.883.500,00	364,00	1.310.954.606,00	0,00	
Setda (bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)																		
Setda (bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)		-	286.313.600	-	784.943.996	-	1.288.560.691	-	1.912.499.775	-	205.278.500	-	631.847.238	-	1.103.528.822	92	1.728.458.560	-
Setda (bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)	24	286.313.600	48	784.943.996	73	1.288.560.691	98	1.912.499.775	11	205.278.500	33	631.847.238	58	1.103.528.822	90	1.728.458.560	45	
Setda (bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)	75	124.980.000	150	319.758.096	225	489.548.096	300	665.552.315	77	83.541.500	155	235.275.339	275	430.071.959	447	622.378.441	103	
Setda (bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)	156	114.791.200	321	310.231.100	486	521.197.275	650	842.425.460	156	85.790.000	418	269.407.879	667	453.216.377	949	753.495.127	100	
Setda (bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)	63	46.542.400	126	154.954.800	189	277.815.320	252	404.522.000	80	35.947.000	192	127.164.020	316	220.240.486	450	352.584.992	127	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan Tribulan																						
tas (%)	Predikat Penilaian			Kualitas	Kuantitas (%)		Predikat Penilaian			Kualitas	Kuantitas (%)		Predikat Penilaian			Kualitas	Kuantitas (%)		Predikat Penilaian			Kualita
	I				II			III			IV			V			VI			VII		s
	R	K	R	Keterangan	K	R	K	R	Keterangan	K	R	K	R	Keterangan	K	R	K	R	Keterangan	K	R	Ketera
1,517839137	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	-	0	89,24567229	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0	115,3493834	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0	93,25633765	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	-	-
1,517839137	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	-	0	89,24567229	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0	115,3493834	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0	93,25633765	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	-	-
48,42455247	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-	-	50	56,17666164	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	75	76,58761362	SEDANG	TINGGI	-	100	90,51541026	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	-	-	-
0,738545571	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	-	100	90,66450182	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	150	117,0688199	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	100	93,35104237	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	-	-	-
15,35190671	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	-	0	41,14042498	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0	60,34356563	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	100	89,30275572	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	-	-	-
314,102641	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	-	60	604,354941	RENDAH	SANGAT TINGGI	-	40	942,241561	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	30	85,57533027	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	-	-
314,102641	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	0	604,354941	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0	942,241561	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0	227,0111086	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	-	-
0	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	-	0	0	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0	0	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	100	52,73776353	SANGAT TINGGI	RENDAH	-	-	-	-
0	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-	-	108,3333333	0	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-	105	0	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-	100	90,92755478	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	-	-	-
59,109	SANGAT TINGGI	RENDAH	-	-	100	113,62685	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	111,1111111	183,10585	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	100	92,78546718	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	-	-	-
0	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	-	0	0	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0	0	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0	137,3524495	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	-	-
0	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-	-	120	0	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-	104,4444444	0	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-	100	84,72138383	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	-	-	-
71.65	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	-	0.00	56.37	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	0.00	40.09	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0.00	36.28	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	-	-
71.65	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	-	0.00	56.37	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	68.42	40.09	SEDANG	SANGAT RENDAH	-	43.33	36.28	SEDANG	TINGGI	-	-	-	-
90.71	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	0.00	63.35	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	0.00	43.87	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0.00	43.21	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	-	-
78.13	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	0.00	55.41	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	0.00	76.71	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0.00	55.06	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	-	-
61.52	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	-	0.00	52.53	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	0.00	23.80	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0.00	23.05	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	-	-
97,52	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	-	71,11	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	-	66,67	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	-	88,67	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	-	-
148,58	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	-	104,70	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	102,70	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	130,71	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	-	-
98,83	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	-	81,80	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	72,40	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	-	99,37	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	-	-

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

130,94	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	92,05	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	101,88	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	96,39	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
81,60	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	80,90	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	86,91	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	98,49	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
283,74	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	221,68	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	190,04	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	275,75	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
64,70	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	-	23,18	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	-	19,75	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	-	63,02	SANGAT RENDAH	RENDAH	-
80,53	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	83,67	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	89,67	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	98,04	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
63,29	RENDAH	RENDAH	-	32,78	63,93	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	21,85	72,01	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	16,39	33,39	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
63,29	RENDAH	RENDAH	-	32,78	63,93	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	21,85	72,01	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	16,39	33,39	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
66,20	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	0,00	43,48	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	69,55	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	0,00	41,20	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
51,83	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	0,00	69,85	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	0,00	71,38	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	0,00	28,46	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
150,62	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	100,00	67,91	SANGAT TINGGI	SEDANG	-	100,00	76,61	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	75,00	53,36	SEDANG	RENDAH	-
63,29	RENDAH	RENDAH	-	32,78	63,93	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	21,85	72,01	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	16,39	92,51	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
63,29	RENDAH	RENDAH	-	32,78	63,93	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	21,85	72,01	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	16,39	92,51	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
66,20	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	0,00	43,48	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	69,55	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	100,00	93,67	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
51,83	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	0,00	69,85	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	0,00	71,38	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	100,00	91,59	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
150,62	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	100,00	67,91	SANGAT TINGGI	SEDANG	-	100,00	76,61	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	96,60	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
101,00	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	76,53	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	77,31	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	89,15	SANGAT RENDAH	TINGGI	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

245.021,67	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	450.670,79	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	707.998,69	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	1.242.332,57	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
100,00	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	50,00	100,00	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	33,33	100,00	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	30,00	100,00	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
367,30	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	168,33	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	169,05	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	195,51	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
86,11	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	100,00	82,70	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	77,30	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	73,84	SANGAT TINGGI	SEDANG	-
437,78	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	100,00	88,93	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	80,00	74,11	TINGGI	SEDANG	-	100,00	91,40	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
86,18	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	66,67	69,26	SEDANG	SEDANG	-	60,00	84,52	RENDAH	TINGGI	-	100,00	88,23	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
83,18	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	56,09	SANGAT TINGGI	RENDAH	-	100,00	69,05	SANGAT TINGGI	SEDANG	-	100,00	99,74	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
79,96	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	73,75	SANGAT TINGGI	SEDANG	-	100,00	79,72	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	89,22	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
282,72	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	520,00	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	816,80	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	577,00	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
99,80	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	40,00	99,80	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	40,00	99,79	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	120,00	91,23	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
460,54	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	284,20	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	237,55	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	316,20	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
90,58	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	91,77	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	66,67	100,02	SEDANG	SANGAT TINGGI	-	100,00	92,98	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
79,15	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	112,50	83,49	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	120,83	89,57	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	92,25	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
80,33	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	50,00	50,22	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	63,83	49,62	RENDAH	SANGAT RENDAH	-	100,00	77,26	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
58,76	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	100,00	37,83	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-	50,00	51,92	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	100,00	80,69	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
23,09	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	77,60	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	50,00	29,04	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	100,00	88,47	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	50,00	38,50	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	100,00	91,11	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
18.376,63	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	10.893,05	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	17.112,85	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	14.907,99	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
18,37	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	75,00	43,21	SEDANG	SANGAT RENDAH	-	133,33	126,43	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	100,00	97,22	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
708,63	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	629,02	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	655,29	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	878,18	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
77,53	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	84,61	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	89,47	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	85,79	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
90,09	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	92,85	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	100,00	95,72	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	100,00	89,04	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
82,83	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	90,05	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	100,00	95,95	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-	100,00	89,03	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
87,55				66,48	68,23				79,21	75,21				79,15	51,43			
85,26	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	79,46	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	79,11	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	85,72	SANGAT RENDAH	TINGGI	-
85,26	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	79,46	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	79,11	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	85,72	SANGAT RENDAH	TINGGI	-
108,13	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	49,32	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	-	59,50	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	-	71,18	SANGAT RENDAH	SEDANG	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

85,26	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	79,46	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	79,11	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	85,72	SANGAT RENDAH	TINGGI	-
129,66	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	123,49	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	91,56	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	91,28	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
63,91	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	-	59,89	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	-	73,25	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	-	95,90	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
85,26	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	79,46	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	79,11	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	85,72	SANGAT RENDAH	TINGGI	-
85,26	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	79,46	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	79,11	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	85,72	SANGAT RENDAH	TINGGI	-
39,15	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	-	41,71	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	-	54,17	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	-	84,49	SANGAT RENDAH	TINGGI	-
100,46	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	-	75,34	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	-	82,26	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	72,86	SANGAT RENDAH	SEDANG	-
84,43	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	82,46	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	90,39	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	69,47	SANGAT RENDAH	SEDANG	-
104.017,76	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	142.950,69	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	106.053,75	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	52.098,03	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
46,57	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	46,57	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	64,28	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	0,00	96,12	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
85,95	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	48,66	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	71,86	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	0,00	95,91	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
100,77	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	98,10	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	106,72	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	119,39	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
87,68	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	84,26	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	88,94	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	97,33	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
324.985,23	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	8.162,62	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	12.046,91	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	16.792,98	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
56,22	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	0,00	82,66	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	82,66	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	82,66	SANGAT RENDAH	TINGGI	-
1.519,83	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	1.537,32	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	1.714,77	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	1.355,44	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
85,37	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	21,29	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	32,19	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	89,40	SANGAT RENDAH	TINGGI	-
50,57	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	62,15	SANGAT RENDAH	RENDAH	-	0,00	81,08	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	93,19	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
10,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,39	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	92,35	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	96,03	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
50,26	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	83,77	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	127,24	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	97,87	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
7.227,37	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	7.026,05	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	6.639,00	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	6.423,08	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
81,21	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	71,63	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	0,00	87,57	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	92,07	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
75,30	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	0,00	82,03	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	85,72	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	90,04	SANGAT RENDAH	TINGGI	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

899,31	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	987,98	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	1.153,74	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	1.021,39	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
49,92	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	77,03	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	94,61	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	88,30	SANGAT RENDAH	TINGGI	-
0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
122,26	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	90,58	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	0,00	104,90	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-	0,00	100,00	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	-
72	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	-	80	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	86	SANGAT RENDAH	TINGGI	-	-	90	SANGAT RENDAH	TINGGI	-
72	SANGAT RENDAH	SEDANG	-	69	80	SEDANG	TINGGI	-	79	86	TINGGI	TINGGI	-	92	90	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
67	SANGAT TINGGI	SEDANG	-	103	74	SANGAT TINGGI	SEDANG	-	122	88	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	149	94	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
75	SANGAT TINGGI	SEDANG	-	130	87	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	137	87	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	146	89	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
77	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	152	82	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	167	79	SANGAT TINGGI	TINGGI	-	179	87	SANGAT TINGGI	TINGGI	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".